



LAPORAN AKHIR ANALISIS KEMISKINAN MULTIDIMENSI DAN KETAHANAN PANGAN DI DIY



Kerjasama
Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DIY
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY
2016



Kata Pengantar

Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan DIY 2015 merupakan hasil kerjasama Balai Statistik Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyusunan Analisis Kemiskinan Multidimensi di Daerah Istimewa Yogyakarta bertujuan untuk mendapatkan informasi *Multidimensional Poverty Indexs* (MPI) dan indikator penyusunnya pada berbagai sudut pandang dan kaitannya dengan ketahanan pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

MPI merupakan salah satu pendekatan baru dalam mengukur kemiskinan saat ini. MPI dikembangkan awalnya oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI)* yang merupakan lembaga riset di *Oxford University*. Berbeda dengan pendekatan pengukuran kemiskinan lainnya, MPI melihat potret kemiskinan dari banyak dimensi (multidimensi). Sehingga bisa secara lebih luas memotret kemiskinan yang terjadi di suatu daerah jika dibandingkan pendekatan satu dimensi seperti yang selama ini digunakan seperti pendekatan konsumsi (*basic need approach*). MPI dalam perkembangannya sudah masuk ke dalam perhitungan kemiskinan global, secara periodik sejak tahun 2010 sudah menjadi indikator dalam *Human Development Report*. Pada perkembangan terakhir, MPI menjadi salah satu indikator dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Terima kasih dan penghargaan kami berikan kepada Kepala Balai Statistik Daerah Bappeda DIY beserta jajarannya, atas dukungan hingga terselesaikannya kegiatan analisis kemiskinan multidimensi dan ketahanan pangan di DIY. Juga kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Yogyakarta, Juni 2016
Badan Pusat Statistik
Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala,

J. Bambang Kristianto, MA, M.Sc.

Ringkasan Eksekutif

Analisis tentang dimensi dan penyebab kemiskinan menjadi sangat penting karena pemahaman terhadap masalah kemiskinan ini akan menentukan strategi penanggulangannya. Perkembangan studi tentang kemiskinan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam analisis *Human Development Report* (HDR) yang diajukan oleh *United National Development Program* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI). Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan baru melalui *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010.

MPI melihat struktur kemiskinan lebih luas bukan sekedar pendapatan atau konsumsi tapi mendefinisikan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisis MPI merupakan suatu terobosan baru dalam memotret kondisi kemiskinan. Dengan MPI, pemerintah daerah akan mendapatkan gambaran kemiskinan yang lebih luas dan kaitannya dengan pola pendekatan konsumsi yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). MPI juga diharapkan lebih objektif dalam mendapatkan strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di samping tetap didukung oleh kebijakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

Sumber data perhitungan MPI menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 dan 2015. Data ini menjadi data dasar dalam mengembangkan dan menyusun MPI. Karena data Susenas ada setiap tahun maka analisis MPI dapat dibuat setiap tahun sehingga kelihatan tren perkembangan MPI. Selain itu juga digunakan data lain sebagai pendukung analisis yaitu data Podes 2014.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa indikator kemiskinan berupa proporsi penduduk miskin secara multidimensi dapat menunjukkan insiden atau besarnya persentase penduduk miskin. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta adalah sebesar 21,64 persen dan mengalami kenaikan sekitar 0,51 poin menjadi 22,15 pada tahun 2015. Selama tahun 2013-2015 intensitas kemiskinan multidimensi di D.I. Yogyakarta cenderung menunjukkan perubahan kurang bagus. Intensitas kemiskinan multidimensi mengalami peningkatan sebesar 3,23 poin dari 41,37 persen pada tahun 2013 menjadi 44,60 persen di tahun 2015. Tingkat kemiskinan multidimensi DIY yang sudah disesuaikan dengan

intensitas kemiskinan multidimensi (A) adalah sebesar 9,01 persen. Sementara itu pada tahun 2015 angka tersebut sedikit meningkat menjadi 9,89 persen.

Sementara itu, penurunan persentase penduduk miskin moneter yang terjadi selama tahun 2013-2015 tidak diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin multidimensi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan atau pengeluaran per kapita penduduk selama periode 2013-2015 tidak sepenuhnya mampu ditransformasikan menjadi peningkatan *capabilities* dalam pendidikan, kesehatan maupun standar hidup yang lebih baik.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	3
1.3. Referensi Hukum.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1. Definisi Kemiskinan.....	5
2.2. Pengukuran Kemiskinan.....	6
2.3. Ketahanan (Kerawanan) Pangan Rumah Tangga.....	11
2.4. Intensitas Kemiskinan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi	20
2.5. Kerangka Pemikiran.....	23
BAB 3. KONSEP DAN METODOLOGI	
3.1. Konsep dan Teknik Pengukuran MPI	26
3.2. Keterbatasan Data dan Aplikasi MPI	32
3.3. Teknik Penghitungan MPI	36
3.4. Sumber Data.....	39
BAB 4. ANALISIS MPI DAN KETAHANAN PANGAN	
4.1. MPI Daerah Istimewa Yogyakarta.....	40
4.2. MPI menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota	43
4.3. MPI menurut Karakteristik Sosial Ekonomi	47
4.4. Intensitas Kemiskinan menurut MPI.....	50
4.5. Hubungan MPI dengan Indikator Kemiskinan Absolut	50
4.6. Ketahanan Pangan Rumah Tangga	52
BAB 5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Saran	58
Lampiran.....	59
Daftar Pustaka	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Derajat Ketahanan Pangan	16
Tabel 3.1.	Variabel yang Digunakan Dalam Penghitungan Kemiskinan Multidimensional	33
Tabel 3.2.	Angka Kecukupan Kalori Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Berdasarkan AKG 2004	35
Tabel 3.3.	Teknik Perhitungan MPI	39
Tabel 4.1.	Indikator-indikator Kemiskinan Multidimensi D.I. Yogyakarta Berdasarkan Klasifikasi Daerah, 2013 dan 2015	44
Tabel 4.2.	Perbandingan MPI berdasarkan Lapangan Usaha KRT di DIY, Tahun 2013 dan 2015	48
Tabel 4.3.	Perbandingan MPI menurut Pendidikan Tertinggi ART di DIY, Tahun 2013 dan 2015	49
Tabel 4.4.	Perbandingan MPI menurut kuantil Pengeluaran di DIY, Tahun 2013 dan 2015	49
Tabel 4.5.	Status kemiskinan Multidimensional dan Moneter Tahun 2013 & 2015	52
Tabel 4.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Derajat Ketahanan Pangan dan Status Daerah Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta Tahun 2015	53
Tabel 4.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Determinan dan Derajat Ketahanan Pangan di D.I. Yogyakarta Tahun 2015	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Kerangka Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (RAN PG 2006-2011)	13
Gambar 2.2.	Kerangka Sistem Ketahanan Pangan (Suryana 2003)	14
Gambar 2.3.	Kerangka pemikiran (Modifikasi dari Eka Herdiana, 2009)	25
Gambar 3.1.	Dimensi dan Indikator setiap Dimensi dalam MPI	30
Gambar 4.1.	Hasil Perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi DIY, 2013 dan 2015.....	40
Gambar 4.2.	Kontribusi Setiap Dimensi Terhadap Nilai MPI	42
Gambar 4.3.	Perbandingan Indikator Kemiskinan di DIY, 2013	42
Gambar 4.4.	Headcount (H) dan MPI (Mo) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013 & 2015.....	46
Gambar 4.5.	Perbandingan Headcount (H) dan MPI menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2013	47
Gambar 4.6.	Intensitas Kemiskinan menurut MPI di DIY Tahun 2015	50

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam beberapa dekade terakhir ini, pengertian dan pemahaman tentang kemiskinan telah banyak bergeser dari pengertian dan pemahaman sebelumnya. Apabila sebelumnya kemiskinan dipandang secara sempit hanya pada aspek ekonomi saja, kini pengertian kemiskinan berkembang mencakup aspek-aspek kehidupan yang jauh lebih luas.

Analisis tentang dimensi dan penyebab kemiskinan menjadi sangat penting karena pemahaman terhadap masalah kemiskinan ini akan menentukan strategi penanggulangannya. Terdapat beberapa masalah penting yang berkaitan dengan ketidakberdayaan masyarakat menghadapi kemiskinan yaitu 1). Pengalaman empiris kegagalan penanggulangan kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan. Kemiskinan menjadi lebih kompleks bukan hanya sekedar *basic needs* saja. 2). Pemecahan masalah kemiskinan bukan hanya berkutat pada masalah ekonomi namun juga berkembang menjadi masalah sosial, budaya dan politik. Hal ini dikarenakan kemiskinan timbul apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan-kemampuan utama, tidak memiliki pendapatan, atau mendapatkan pendidikan yang memadai, memiliki kondisi kesehatan yang buruk, merasa tidak aman, memiliki kepercayaan diri yang rendah atau suatu perasaan tidak berdaya atau tidak memiliki hak seperti kebebasan berbicara (Sen, 1987).

Perkembangan studi tentang kemiskinan mengalami pergeseran yang cukup signifikan dalam analisis *Human Development Report* (HDR) yang diajukan oleh *United National Development Program* (UNDP) dan *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI). Sejak tahun 2010, UNDP dan OPHI menyepakati sebuah inisiasi pengukuran kemiskinan baru melalui *Multidimensional Poverty Index* (MPI) yang dimuat dalam HDR 2010. Meskipun konsep kemiskinan multidimensional telah diterima oleh berbagai disiplin ilmu dan bahkan telah dimasukkan ke dalam agenda pembangunan, pengukuran dan pengaplikasiannya masih terbatas (Mohanty, 2011). Hingga kini pengukurannya masih dominan menggunakan pendekatan moneter (pendapatan atau pengeluaran).

Bourginon & Chakravarty (2003) menyebutkan bahwa kemiskinan atau kesejahteraan seseorang tergantung pada variabel moneter maupun non moneter oleh karena itu pengukuran kemiskinan harus didasarkan pada indikator-indikator pendapatan atau pengeluaran begitu juga pada indikator-indikator *non-income* sehingga dapat

mengidentifikasi aspek-aspek dari kesejahteraan atau kemiskinan yang tidak tertangkap oleh hanya variabel pendapatan.

Berbeda dengan metode pengukuran kemiskinan yang selama ini berbasis pendapatan atau konsumsi, MPI melihat struktur kemiskinan lebih luas bukan sekedar pendapatan atau konsumsi tetapi mendefinisikan secara multidimensi seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup. Konsep ini sebenarnya sudah diutarakan oleh Amartya Sen, yang menyebutkan bahwa kemiskinan itu harus dilihat dari berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kualitas hidup, demokrasi dan kebebasan masyarakat terhadap akses ekonomi (Sen, 2000).

MPI meliputi tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kualitas kehidupan. Ada sepuluh indikator yang lebih komprehensif atau lebih adil dalam mengukur kemiskinan. Dan indikator yang ditetapkan dalam MPI merupakan cakupan dari tujuan pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Cakupan ini menjadi lebih bijaksana bagi studi-studi kemiskinan. Bagi UNDP menjadi lebih holistik dalam melihat dimensi kemiskinan yang terus mengalami pergeseran akibat perubahan struktur pembangunan secara global. Dan menjadi dasar dalam strategi penanggulangan kemiskinan secara global.

Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, Analisis MPI merupakan suatu terobosan baru dalam memotret kondisi kemiskinan. Selama ini terdapat sedikit keraguan terhadap hasil perhitungan kemiskinan absolut yang menunjukkan bahwa provinsi ini angka kemiskinannya terbesar di Jawa. Dengan MPI, pemerintah daerah akan mendapatkan gambaran kemiskinan yang lebih luas dan kaitannya dengan pola pendekatan konsumsi yang selama ini digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). MPI juga diharapkan lebih objektif dalam mendapatkan strategi penanggulangan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta, di samping tetap didukung oleh kebijakan untuk mendapatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.

Masyarakat miskin harus terlibat dalam proses pertumbuhan yang ada dengan peningkatan tidak saja dalam kualitas asupan gizi, tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan serta standar hidup. Mereka akan dapat mengakses pasar, institusi, dan infrastruktur yang ada. Pertumbuhan ekonomi secara makro sebagai syarat cukup upaya pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pemerataan. Ketahanan pangan merupakan suatu hal yang utama dalam pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Upaya pencapaian ketahanan pangan telah menjadi perhatian pada lingkup nasional dan internasional. Kerentanan atas pangan dapat mengakibatkan rendahnya

kualitas hidup masyarakat, baik pada aspek fisik-kesehatan, sosial, maupun ekonomi. Dengan demikian menarik untuk dilihat bagaimana kondisi kemiskinan baik pendekatan multidimensi maupun pendekatan absolut/moneter di DIY, termasuk pergeseran nilainya pada kondisi terakhir, dan kaitannya dengan ketahanan pangan rumah tangga.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pekerjaan Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan DIY adalah untuk menyediakan hasil analisis sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan DIY, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Tujuan pekerjaan Penyusunan Analisis Kemiskinan Multidimensi dan Ketahanan Pangan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah mendapatkan informasi MPI dan indikator penyusunnya pada berbagai sudut pandang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tujuan khusus dari analisis adalah:

1. Melakukan perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi (MPI).
2. Menganalisis MPI dalam konteks DIY seperti menurut kabupaten/kota, perkotaan/perdesaan, karakteristik sosial ekonomi lain.
3. Membandingkan MPI dengan pendekatan kemiskinan moneter di DIY.
4. Memetakan insiden kemiskinan multidimensi dan moneter.
5. Mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan dan kaitannya dengan ketahanan pangan

1.3. Referensi Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Kepala BPS Nomor 98 Tahun 2015 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Daerah;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 119 Tahun 2015 Tentang Penjabaran APBD Tahun 2016;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BAPPEDA DIY Nomor: 7/DPA/2016.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Definisi Kemiskinan

Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik.

Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Dengan cara membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang per bulan. Sementara definisi menurut UNDP (1997), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan.

Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a) Kemiskinan absolut

Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yakni makanan, pakaian, dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya.

b) Kemiskinan relatif

Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Todaro (1997) menyatakan bahwa variasi kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) perbedaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan, (2) perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh negara lain, (3) perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, (4) perbedaan peranan sektor swasta dan negara, (5) perbedaan struktur industri, (6) perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain dan (7) perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik, dan kelembagaan dalam negeri.

Sementara itu menurut Jhingan (2000), tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait dengan kemiskinan. *Pertama*, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki ketrampilan ataupun keahlian. Ciri *kedua*, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif, dan yang *ketiga* adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Untuk mengukur kemiskinan, Indonesia melalui BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs*) yang dapat diukur dengan angka atau hitungan Indeks Perkepala (*Head Count Index*), yakni jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil sehingga kita dapat mengurangi angka kemiskinan dengan menelusuri kemajuan yang diperoleh dalam mengentaskan kemiskinan di sepanjang waktu. Salah satu cara mengukur kemiskinan yang diterapkan di Indonesia yakni mengukur derajat ketimpangan pendapatan diantara masyarakat miskin, seperti koefisien Gini antar masyarakat miskin (GP) atau koefisien variasi pendapatan (CV) antar masyarakat miskin (CVP). Koefisien Gini atau CV antar masyarakat miskin tersebut penting diketahui karena dampak guncangan perekonomian pada kemiskinan dapat sangat berbeda tergantung pada tingkat dan distribusi sumber daya di antara masyarakat miskin.

2.2. Pengukuran Kemiskinan

Meskipun fenomena kemiskinan itu merupakan sesuatu yang kompleks, dalam arti tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi-dimensi lain

di luar ekonomi, namun selama ini kemiskinan lebih sering dikonsepsikan dalam konteks ketidakcukupan pendapatan dan harta (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, perumahan, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya berada dalam lingkungan dimensi ekonomi (Nanga, 2006).

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia pertama kali secara resmi dipublikasikan BPS pada tahun 1984 yang mencakup data kemiskinan periode 1976-1981. Semenjak itu setiap tiga tahun sekali BPS menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin, yaitu pada saat modul konsumsi tersedia. Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah suatu batas, yang disebut batas miskin atau garis kemiskinan. Berdasarkan hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978, seseorang dapat dikatakan hidup sehat apabila telah dapat memenuhi kebutuhan energinya minimal sebesar 2100 kalori perhari. Mengacu pada ukuran tersebut, maka batas miskin untuk makanan adalah nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan energinya sebesar 2100 kalori perhari. Agar seseorang dapat hidup layak, pemenuhan akan kebutuhan makanan saja tidak akan cukup, oleh karena itu perlu pula dipenuhi kebutuhan dasar bukan makanan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, serta aneka barang dan jasa lainnya. Ringkasnya, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan dan bukan makanan (BPS, 2010).

Analisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan atau determinan kemiskinan pernah dilakukan oleh Ikhsan (1999). Ikhsan, membagi faktor-faktor determinan kemiskinan menjadi empat kelompok, yaitu modal sumber daya manusia (*human capital*), modal fisik produktif (*physical productive capital*), status pekerjaan, dan karakteristik desa. Modal sumber daya manusia dalam suatu rumah tangga merupakan faktor yang akan mempengaruhi kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan. Dalam hal ini, indikator yang sering digunakan adalah jumlah tahun bersekolah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Secara umum semakin tinggi pendidikan anggota keluarga maka akan semakin tinggi kemungkinan keluarga tersebut bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi.

Variabel modal fisik, yang antara lain luas lantai perkapita dan kepemilikan asset seperti lahan, khususnya untuk pertanian. Kepemilikan lahan akan menjadi faktor yang penting mengingat dengan tersedianya lahan produktif, rumah tangga dengan lapangan usaha pertanian akan dapat menghasilkan pendapatan yang lebih baik.

Kepemilikan modal fisik ini dan kemampuan memperoleh pendapatan sebagai tenaga kerja akan menjadi modal utama untuk menghasilkan pendapatan keluarga. Anggota rumah tangga yang tidak memiliki modal fisik terpaksa menerima pekerjaan dengan bayaran yang rendah dan tidak mempunyai alternatif untuk berusaha sendiri. Komponen selanjutnya adalah status pekerjaan, di mana status pekerjaan utama kepala keluarga jelas akan memberikan dampak bagi pola pendapatan rumah tangga.

World Bank (2002) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.

2.2.1. Mengukur Garis Kemiskinan

- a) Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
- b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll)
- c) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

2.2.2. Teknik perhitungan Garis Kemiskinan

- a) Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (reference population) yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).
- b) Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{i=1}^{52} P_{jk} Q_{jk} = \sum_{i=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana:

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

J = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$HK_j = \frac{\sum_{i=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{i=1}^{52} K_{jk}}$$

Dimana :

HK_j = Harga rata-rata kalori di daerah j

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

GKMj disetarakan dengan 2100 kilo kalori dengan cara mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi.

$$F_j = HK_j \times 2100$$

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi/sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2004 (SPKKD 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$GKNM_j = \sum_{k=1}^n r_{kj} \cdot V_{kj}$$

Dimana:

GKNMp= Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non

makanan daerah p (GKNMp).

V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).

r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPKKD 2004).

k = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

2.2.3. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (GK). Merupakan besaran angka penduduk yang penghasilannya atau konsumsinya di bawah garis kemiskinan, yaitu kelompok populasi yang tidak mampu membeli satu paket bahan kebutuhan pokok.

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana: $A = 0$

Z = Garis Kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

2.3. Ketahanan (Kerawanan) Pangan Rumah Tangga

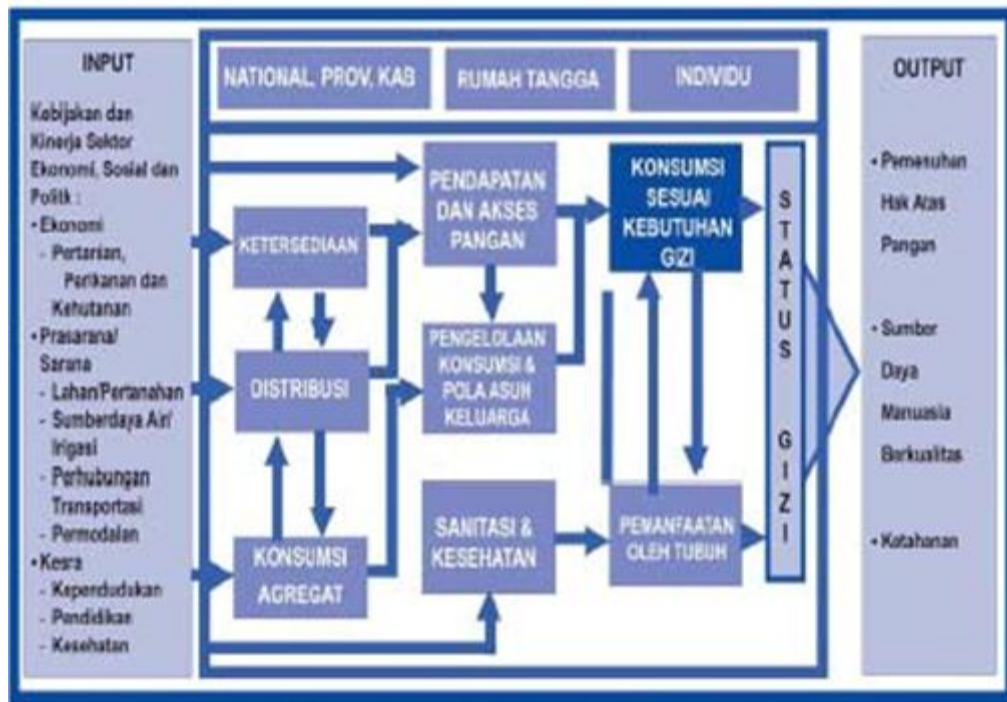
Menurut Soetrisno (2002), pada era globalisasi ini merupakan abad yang tidak akan memberikan banyak harapan bagi para petani di negara-negara berkembang, termasuk petani-petani Indonesia yang kebanyakan adalah petani subsisten. Salah satu masalah yang sangat penting yang akan dihadapi oleh para petani di negara-negara berkembang adalah bagaimana mempertahankan kemampuan mereka untuk menjamin ketahanan pangan bagi mereka sendiri dan bangsa mereka. Jika para petani tidak mampu mempertahankan ketahanan pangan, berarti negara harus menggantungkan kebutuhan

pangan pada perusahaan-perusahaan multinasional yang bergerak dalam sektor produksi pangan.

Ketahanan pangan merupakan kondisi tersedianya pangan yang memenuhi kebutuhan setiap orang setiap saat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Makna yang terkandung dalam ketahanan pangan mencakup dimensi fisik (ketersediaan), ekonomi (daya beli), gizi (pemenuhan kebutuhan gizi individu), nilai budaya dan religius, keamanan pangan (kesehatan), dan waktu (tersedia secara berkesinambungan) (Martianto & Hardinsyah 2001). Maxwell 1990, diacu dalam Manesa 2009, menyatakan bahwa ketahanan pangan secara mendasar didefinisikan sebagai akses semua orang pada setiap waktu terhadap kebutuhan pangan agar dapat hidup sehat. Dari berbagai konsep ketahanan pangan tersebut dapat diartikan bahwa ketahanan pangan rumah tangga disamping faktor ketersediaan dan daya beli juga ditentukan oleh faktor akses pangan itu sendiri baik diperoleh secara langsung maupun melalui jaringan lainnya.

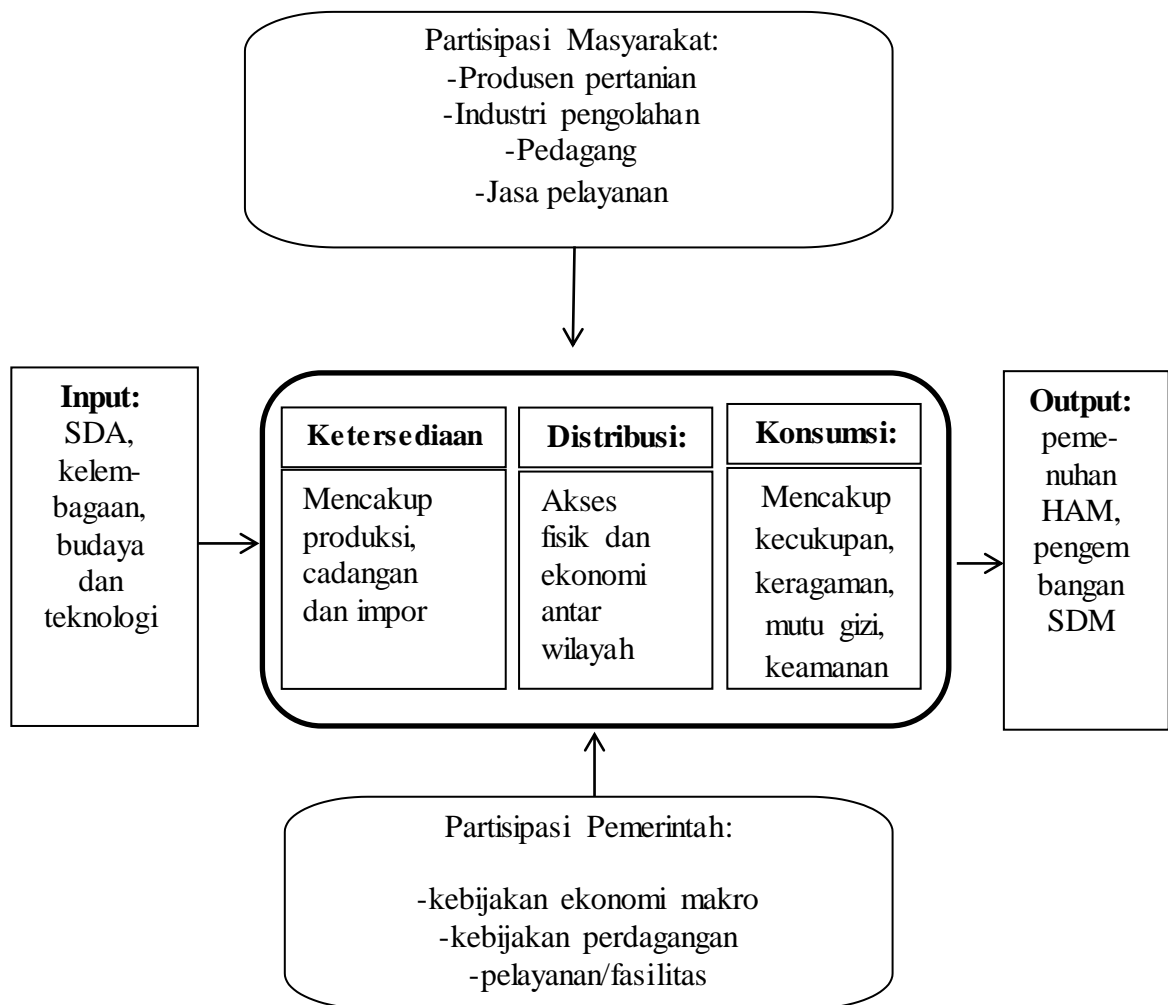
Menurut Tim Penelitian LIPI (2004), berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) dan UU RI No. 7 tahun 1996, yang mengadopsi definisi dari FAO, ada 4 komponen yang harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: 1) kecukupan ketersediaan pangan; 2) stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke musim atau dari tahun ke tahun; 3) aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan serta 4) kualitas/keamanan pangan. Keempat komponen tersebut dapat digunakan untuk mengukur ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan sendiri menurut UU no. 7 tahun 1996 mengenai pangan, merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Sistem ketahanan pangan dan gizi secara komprehensif meliputi empat subsistem, yaitu: (1) ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk, (2) distribusi pangan yang lancar dan merata, (3) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (4) status gizi masyarakat (Gambar 2.1). Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan ditingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin (RAN PG 2006-2010).



Gambar 2.1. Kerangka Sistem Ketahanan Pangan dan Gizi (RAN PG 2006-2011)

Suryana (2003) menyatakan bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem ekonomi pangan yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergis dan interaksi dari ketiga subsistem tersebut. Ketiga subsistem tersebut merupakan satu kesatuan yang didukung oleh adanya berbagai input sumberdaya alam, kelembagaan, budaya dan teknologi. Proses pembangunan ketahanan pangan akan berjalan dengan efisien apabila ada partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah (DBKP 2001). Ketahanan pangan sebagai suatu sistem dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Kerangka Sistem Ketahanan Pangan (Suryana 2003)

2.3.1. Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Menurut *Internasional Congres of Nutrition* (ICN) di Roma tahun 1992, ketahanan pangan rumah tangga adalah kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Definisi tersebut diperluas dengan menambahkan persyaratan “harus diterima oleh budaya setempat”, hal ini disampaikan dalam sidang *Committee on World Food Security* tahun 1995 (Adi 1998). Terdapat empat cara yang dapat dilakukan untuk mengukur ketahanan pangan rumah tangga yaitu berdasarkan asupan individual (melalui recall 24 jam), *household caloric acquisition*, keragaman asupan harian, dan melalui *food coping strategy* (Hoddinott 1999).

Terdapat dua tipe ketidaktahanan pangan dalam rumah tangga yaitu kronis dan

transitory. Ketidaktahanan pangan kronis sifatnya menetap, merupakan ketidakcukupan pangan secara menetap akibat ketidakmampuan rumah tangga dalam memperoleh pangan biasanya kondisi ini diakibatkan oleh kemiskinan. Ketidaktahanan pangan *transitory* adalah penurunan akses terhadap pangan yang sifatnya sementara, biasanya disebabkan oleh bencana alam yang berakibat pada ketidakstabilan harga pangan, produksi, dan pendapatan (Setiawan 2004 dalam Kartika 2005).

Selain konsumsi pangan, informasi mengenai status ekonomi, sosial dan demografi seperti pendapatan, pendidikan, struktur anggota keluarga, pengeluaran pangan dan sebagainya dapat digunakan sebagai indikator risiko terhadap ketidaktahanan pangan rumah tangga (Khomsan 2002b).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suandi (2007), ketahanan pangan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh modal sosial yang ada di masyarakat yakni terkait dengan interaksi sosial yang dilakukan oleh anggota keluarga. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat intensitas anggota rumah tangga dalam berinteraksi sosial maka ketahanan rumah tangga semakin kuat. Hal ini karena modal sosial terkait dengan akses sosial pangan.

2.3.2. Pengukuran Ketahanan Pangan

Pengukuran ketahanan pangan secara kuantitatif menurut FAO (2003) dalam Tanzaha (2005) dapat diukur melalui tingkat ketidakcukupan energi yang menunjukkan keparahan defisit energi yang ditunjukkan oleh defisit jumlah kalori pada seseorang individu di bawah energi yang dianjurkan ($<70\%$). Berdasarkan ukuran tersebut, akan dikatakan kelaparan apabila tingkat kecukupan energinya kurang dari 70% dan disertai dengan penurunan berat badan, dikatakan rawan pangan tingkat berat apabila tingkat kecukupan energinya kurang dari 70% dan tidak disertai penurunan berat badan, bila tingkat kecukupan energinya 70-80% maka dikatakan rawan pangan sedang, bila tingkat kecukupan energi 81 – 90% maka dikatakan rawan pangan ringan, dan bila tingkat kecukupan energi lebih dari 90% maka dikatakan tahan pangan.

Kemiskinan identik dengan ketidaktahanan pangan. Sajogyo secara monumental merumuskan batas kemiskinan dengan pengeluaran setara beras 320 kg/kapita/tahun di pedesaan 480 kg di perkotaan. Khomsan (1997) dalam Khomsan (2002c) mengkaji indikator kemiskinan, ditemukan bahwa konsumsi daging sapi <4 kali sebulan dan konsumsi telur <4 kali seminggu dapat dimasukkan dalam kategori miskin. Dengan ikan

asin sebagai indikator, seseorang dikatakan miskin bila konsumsinya $\geq 110\text{gr/kapita/minggu}$. Semakin banyak mengkonsumsi ikan asin semakin besar peluangnya untuk masuk ke dalam kategori sebagai orang miskin. Rupanya secara sosial ikan asin dianggap oleh masyarakat sebagai komoditas inferior. Padahal dari segi gizi, ikan asin sebenarnya superior karena kandungan proteinnya sekitar 35-40%.

Untuk mengukur derajat ketahanan pangan tingkat rumah tangga, digunakan klasifikasi silang dua indikator ketahanan pangan, yaitu proporsi pengeluaran pangan dan kecukupan konsumsi energi (Kkal) (Jonsson and Toole, 1991 dalam Maxwell and Frankenberger, 1992) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1. Pada tabel tersebut tampak bahwa batasan 80 persen dari konsumsi energi (per unit ekivalen dewasa) akan dikombinasikan dengan proporsi pengeluaran pangan > 60 persen dari total pengeluaran rumah tangga.

Tabel 2.1. Derajat Ketahanan Pangan

Konsumsi Energi	Proporsi Pengeluaran Pangan (Proporsi Pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran)	
	<u>Rendah</u> ($\leq 60\%$ pengeluaran total)	<u>Tinggi</u> ($> 60\%$ pengeluaran total)
<u>Cukup</u> ($> 80\%$ konsumsi energi seharusnya)	I (Tahan Pangan)	II (Rentan Pangan)
<u>Kurang</u> ($\leq 80\%$ konsumsi energi seharusnya)	III (Kurang Pangan)	IV (Rawan Pangan)

2.3.3. Akses Pangan

Konsep mengenai akses didefinisikan sebagai bentuk pertanyaan apakah individu, rumah tangga, atau negara mampu memperoleh pangan yang cukup. Kemampuan rumah tangga ditentukan oleh daya dukung sumberdaya yang dimilikinya baik melalui produksi dan perdagangan pangan maupun komoditi yang dapat dipertukarkan dengan pangan. Apabila kemampuan ini tidak dimiliki maka akan mengalami kelaparan. Dalam sistem ekonomi pasar, hubungan kemampuan seseorang ditentukan oleh apa yang mereka miliki, apa yang dapat dijual, dan apa yang mereka warisi atau pemberian (Amartya sen 1981

dalam Maxwell & Frankenberg, 1992). Akses pangan tingkat rumah tangga adalah kemampuan suatu rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup secara terus menerus melalui berbagai cara, seperti produksi pangan rumah tangga, persediaan pangan rumah tangga, jual-beli, tukar-menukar/barter, pinjam- meminjam, dan pemberian atau bantuan pangan (World food Programme 2005 dalam Hildawati 2008). Akses pangan meliputi akses fisik dan akses ekonomi serta akses sosial.

Keterjaminan akses sepanjang waktu terhadap pangan yang cukup merupakan inti dari definisi ketahanan pangan rumah tangga. Menurut Maxwell dan Frankenger (1992) terdapat empat elemen ketahanan pangan berkelanjutan (*sustainable food security*) di tingkat rumah tangga, yaitu 1) kecukupan pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat; 2) akses pangan, yang didefinisikan sebagai hak untuk memproduksi, membeli atau menukarkan pangan ataupun menerima pemberian; 3) ketahanan, yang didefinisikan sebagai keseimbangan antara kerentanan, resiko, dan jaminan pengaman sosial; dan 4) fungsi waktu, kerawanan pangan dapat bersifat kronis, transisi dan atau siklus.

Kerawanan pangan kronis terjadi dan berlangsung terus menerus yang biasanya disebabkan oleh rendahnya daya beli atau kemampuan memproduksi sendiri sehingga sering terjadi di daerah terisolir dan gersang. Kerawanan pangan transisi terjadi secara mendadak karena ketidakmampuan harga pangan dan produksi pangan atau pendapatan rumah tangga sehingga pada suatu saat tertentu sekelompok orang, rumah tangga atau masyarakat tidak mempunyai cukup pangan untuk dikonsumsi. Keterjaminan akses pangan harus dicapai sampai pada tingkat rumah tangga (*household food security*) sehingga kebutuhan pangan untuk setiap anggota rumah tangga dapat terpenuhi setiap saat (Syarief, 1992).

2.3.3.1. Akses Fisik

Akses fisik akan menentukan apakah sumber pangan yang dikonsumsi dapat ditemui dan mudah diperoleh. Kemudahan dalam memperoleh pangan di tunjang oleh tersedianya sarana fisik yang cukup dalam memperoleh pangan (Penny 1990). Pangan harus tersedia secara terus-menerus dalam suatu pasar/warung apabila rumah tangga tidak dapat memproduksi sendiri pangan yang dibutuhkan. Rimbawan dan Baliwati (2004) dalam Hildawati (2008), menyatakan bahwa salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap pangan dan gizi adalah masyarakat yang tinggal di lokasi atau

tempat yang terpencil. Akses pangan juga bergantung pada daya beli rumah tangga, yang artinya akses pangan terjamin seiring dengan terjaminnya pendapatan dalam jangka panjang. Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa keterjangkauan pangan bergantung pada kesinambungan sumber nafkah. Mereka yang tidak menikmati kesinambungan dan kecukupan pendapatan akan tetap miskin. Semakin banyak jumlah orang miskin, semakin rendah daya akses terhadap pangan, dan semakin tinggi derajat kerawanan pangan suatu wilayah (WFP 2003). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmah (2006), jarak tempat tinggal (akses fisik) yang jauh dari sumber pangan merupakan salah satu faktor yang akan menghambat kemudahan individu atau masyarakat untuk memperoleh pangan yang tentunya akan menghambat konsumsi pangannya. Menurutnya terdapat hubungan negatif signifikan antara jarak tempat tinggal dari warung makan dengan tingkat konsumsi energi dan protein, artinya bahwa konsumsi energi dan protein semakin menurun dengan meningkatnya jarak tempat tinggal ke warung makan.

2.3.3.2. Akses Ekonomi

Kegiatan ekonomi rumah tangga dalam pemenuhan pangan adalah mendapatkan, menghasilkan atau menerima uang, pangan dan yang lainnya; mengkonsumsi, membelanjakan, memberi atau mengumpulkan uang, pangan dan aset/harta lain; dan mengutang serta membayar kembali hutang tersebut. Matapencaharian berhubungan erat dengan akses pangan yang meliputi produksi rumah tangga dan alat untuk memperoleh pendapatan (WFP 2005 dalam Hildawati 2008). Rumah tangga dapat dikatakan tahan pangan apabila tercukupinya permintaan akan pangan. Pengukuran operasional atas permintaan akan pangan tersebut dalam jangka waktu pendek dapat dipakai untuk memonitor akses ekonomi rumah tangga akan pangan, yaitu pendapatan/pengeluaran dan harga (Sharma 1992 dalam Hildawati 2008).

2.3.3.3. Akses Sosial

Selain akses ekonomi dan akses fisik terhadap pangan terdapat akses sosial. Akses sosial merupakan suatu akses atau cara untuk mendapatkan pangan yang dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan pangannya melalui berbagai dukungan sosial, seperti bantuan atau dukungan sosial dari keluarga/kerabat, tetangga, serta teman. Bantuan atau dukungan dari saudara/kerabat, tetangga, serta teman dapat berupa bantuan pinjaman

uang/pangan, pemberian bantuan pangan, pertukaran pangan, dan lain sebagainya. Selain dukungan sosial, kerawanan pangan berdasarkan akses sosial dapat dilihat dari tingkat pendidikannya (Hildawati 2008).

Menurut Sarafino (1996), manusia sebagai individu dalam kehidupannya dihadapkan dengan berbagai hal yang menyangkut kepentingan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap orang memerlukan bantuan atau pertolongan dari orang lain atau sumber-sumber dukungan sosial. Dukungan sosial tidak selamanya tersedia pada diri sendiri melainkan harus diperoleh dari orang lain yakni rumah tangga (suami atau istri), saudara atau masyarakat (tetangga) dimana orang tersebut tinggal.

2.3.4. Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan adalah informasi pangan yang dimakan (dikonsumsi) oleh seseorang atau kelompok, baik berupa jenis maupun jumlahnya pada waktu tertentu, artinya konsumsi pangan dapat dilihat dari aspek jumlah maupun jenis pangan yang dikonsumsi. Konsumsi pangan berkaitan erat dengan gizi dan kesehatan, kesejahteraan, pengupahan, serta perencanaan ketersediaan dan produksi pangan (Hardinsyah & Suhardjo 1990).

Tiga tujuan seseorang mengonsumsi pangan yaitu tujuan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah untuk memenuhi rasa lapar atau keinginan memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan tubuh. Tujuan psikologis merupakan sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan untuk memenuhi kepuasan emosional ataupun selera seseorang. Tujuan sosiologis adalah berhubungan dengan upaya pemeliharaan hubungan antar manusia dalam kelompok kecil maupun kelompok besar (Riyadi 1996).

Tercukupinya konsumsi pangan merupakan syarat mutlak terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Ketidaktahanan pangan dapat digambarkan dari perubahan konsumsi pangan yang mengarah kepada penurunan kuantitas dan kualitas, termasuk perubahan frekuensi konsumsi makanan pokok. Angka riil kuantitas konsumsi pangan harus dibandingkan dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk mengetahui cukup tidaknya asupan gizi. Makanan telah dijadikan indikator oleh ekonom untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat. Teori Engel misalnya, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan maka proporsi pengeluaran untuk makanan sangat kecil. Hukum Bennet menerangkan bahwa konsumsi pangan yang terdiversifikasi akan dicapai

bersama dengan meningkatnya pendapatan. Hukum Bennet menerangkan bahwa konsumsi umbi-umbian akan semakin menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan. Umbi-umbian adalah sumber kalori yang harganya lebih murah sehingga terjangkau oleh orang miskin dibandingkan sereal (Khomsan 2002b).

Pada prinsipnya penilaian jumlah konsumsi zat gizi berdasarkan pada konsumsi pangan dan data kandungan zat gizi bahan makanan atau Daftar Konsumsi Bahan Makanan (DKBM). DKBM menunjukkan kandungan berbagai kandungan berbagai zat gizi dari berbagai jenis pangan atau makanan dalam seratus gram bagian yang dapat dimakan (BDD) (Hardinsyah & Martianto 1992). Dengan menggunakan DKBM, jumlah dan komposisi zat gizi yang diperoleh seseorang atau kelompok orang dapat dihitung dengan atau dinilai. Secara umum, penilaian zat gizi tertentu yang dikonsumsi dapat dihitung dengan rumus :

$$G_{ij} = \frac{BP_j}{100} \times \frac{Bdd_j}{100} \times KG_{ij}$$

Keterangan :

KG_{ij} = kandungan zat gizi tertentu (i) dari pangan (j) atau makanan yang dikonsumsi dengan satuannya.

BP_j = berat pangan atau makanan (j) yang dikonsumsi

Bdd_j = bagian yang dapat dimakan (dalam persen atau gram dari 100 gram pangan atau makanan (j))

G_{ij} = zat gizi yang dikonsumsi dari pangan atau makanan (j)

2.4. Intensitas Kemiskinan dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Kemiskinan yang menimpa sekelompok masyarakat berhubungan dengan status sosial ekonominya dan potensi wilayah. Faktor sosial ekonomi yaitu faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri dan cenderung melekat pada dirinya, seperti: tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, tingkat kesehatan rendah dan produktivitas yang rendah. Sedangkan faktor yang berasal dari luar berhubungan dengan potensi alamiah, teknologi dan rendahnya aksesibilitas terhadap kelembagaan yang ada. Kedua faktor tersebut menentukan aksesibilitas masyarakat miskin dalam memanfaatkan peluang-peluang ekonomi dalam menunjang kehidupannya. Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu fenomena

yang kait mengkait antara satu faktor dengan faktor lainnya. Oleh karena itu mengkaji masalah kemiskinan harus diperhatikan jalinan antara faktor-faktor penyebab kemiskinan dan faktor-faktor yang berada di balik kemiskinan tersebut.

Todaro (2006) memperlihatkan jalinan antara kemiskinan dan keterbelakangan dengan beberapa aspek ekonomi dan aspek non ekonomi. Tiga komponen utama sebagai penyebab keterbelakangan dan kemiskinan masyarakat, faktor tersebut adalah rendahnya taraf hidup, rendahnya rasa percaya diri dan terbebas kebebasan ketiga aspek tersebut memiliki hubungan timbal balik. Rendahnya taraf hidup disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya pendapatan disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja, rendahnya produktivitas tenaga kerja disebabkan oleh tingginya pertumbuhan tenaga kerja, tingginya angka pengangguran dan rendahnya investasi perkapita.

Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh tingginya tingkat pertumbuhan tenaga kerja dan rendahnya investasi perkapita, dan tingginya pertumbuhan tenaga kerja disebabkan oleh penurunan tingkat kematian dan rendahnya investasi perkapita disebabkan oleh tingginya ketergantungan terhadap teknologi asing yang hemat tenaga kerja. Selanjutnya rendahnya tingkat pendapatan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, kesempatan pendidikan, pertumbuhan tenaga kerja dan investasi perkapita.

Secara lebih khusus negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand menemukan bahwa kemiskinan dan ketidakmerataan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: Produktivitas tenaga kerja yang rendah sebagai akibat rendahnya teknologi, penyediaan tanah dan modal jika dibanding dengan tenaga kerja, tidak meratanya distribusi kekayaan terutama tanah.

Studi empiris Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Departemen Pertanian (1995) yang dilakukan pada tujuh belas propinsi di Indonesia, menyimpulkan bahwa ada enam faktor utama penyebab kemiskinan, yaitu:

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, hal ini ditunjukkan dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingginya angka ketergantungan, rendahnya tingkat kesehatan, kurangnya pekerjaan alternatif, rendahnya etos kerja, rendahnya keterampilan dan besarnya jumlah anggota keluarga.
2. Rendahnya sumber daya fisik, hal ini ditunjukkan oleh rendahnya kualitas dan aset produksi serta modal kerja.
3. Rendahnya penerapan teknologi, ditandai oleh rendahnya penggunaan input mekanisasi pertanian.

4. Rendahnya potensi wilayah yang ditandai dengan oleh rendahnya potensi fisik dan infrastruktur wilayah.
5. Kurang tepatnya kebijaksanaan yang dikukan oleh pemerintah dalam investasi dalam rangka pengentasan kemiskinan.
6. Kurangnya peranan kelembagaan yang ada.

Selain itu kemiskinan dapat terjadi akibat sistem ekonomi yang berlaku karena yang kuat menindas yang lemah, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai bagi golongan yang bersangkutan, struktur pemilikan, dan penggunaan tanah, pola usaha yang terbelakang, dan pendidikan angkatan kerja yang rendah.

Dengan rendahnya faktor-faktor diatas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat terhadap rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima, pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

Untuk kasus Indonesia diperkirakan ada empat faktor penyebab kemiskinan. Faktor tersebut yaitu: rendahnya taraf pendidikan, rendahnya taraf kesehatan, terbatasnya lapangan kerja dan kondisi keterisolasian.

Sedangkan **Asnawi (1994)** menyatakan suatu keluarga menjadi miskin disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya alam, faktor teknologi. Sumber daya manusia ditentukan oleh tingkat pendidikan, *dependensi ratio*, nilai sikap, partisipasi, keterampilan pekerjaan, dan semuanya itu tergantung kepada sosial budaya masyarakat itu sendiri, kalau sosial budaya masyarakatnya masih terbelakang maka rendahlah mutu sumber daya manusianya. Sebaliknya kalau sosial budaya modern sesuai dengan tuntutan pembangunan maka tinggilah mutu sumber daya manusia tersebut.

Selanjutnya dikatakan bahwa potensi suatu wilayah ditentukan oleh keadaan fisik, sarana dan prasarana, iklim, keseluruhan lahan atau keadaan air, keadaan topografi dan sarana seperti irigasi, jalan transportasi, pasar, kesehatan (sanitasi), pendidikan, gudang, fasilitas pengolahan, kondisi pertanian, kondisi pertanian, lembaga keuangan dan perbankan dan lain-lain.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada 2 (dua) faktor utama yaitu (1) Tingkat pendapatan nasional rata-rata dan (2) Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Setinggi apapun tingkat pendapatan nasional perkapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi

pendapatan yang tidak merata maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah (Daulay, 2009).

Menurut Ginanjar (1996) ada 4 faktor penyebab kemiskinan, faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Rendahnya taraf pendidikan.
- b. Rendahnya taraf kesehatan.
- c. Terbatasnya lapangan kerja.
- d. Kondisi keterisolasian.

Kemiskinan melekat pada diri penduduk miskin, mereka miskin karena tidak memiliki aset produksi dan kemampuan untuk meningkatkan produktivitas. Mereka tidak memiliki aset produksi karena mereka miskin, akibatnya mereka terjatuh dalam lingkungan kemiskinan tanpa ujung dan pangkal.

Pendapat Ginanjar (1996) bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Sumber daya alam yang rendah.
- b. Teknologi dan unsur penduduknya yang rendah.
- c. Sumber daya manusia yang rendah.
- d. Saran dan prasarana termasuk kelembagaan yang belum baik.

Rendahnya beberapa faktor di atas menyebabkan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Dengan rendahnya aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan berakibat pada rendahnya produktivitas dan pendapatan yang diterima yang pada gilirannya pendapatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum yang menyebabkan terjadinya proses kemiskinan.

2.5. Kerangka Pemikiran

Ketahanan pangan rumah tangga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah karakteristik rumah tangga (meliputi ukuran rumah tangga, pendidikan kepala dan ibu rumah tangga, dan akses pangan termasuk dukungan sosial dan pengetahuan gizi), *food coping strategy*, jaringan sosial masyarakat, dan konsumsi rumah tangga. Pada penelitian ini hanya akan memeriksa pengaruh beberapa variabel yaitu ukuran rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga, pengeluaran rumah tangga, akses pangan dan tingkat konsumsi rumah tangga. Variabel-variabel ini akan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap ketahanan

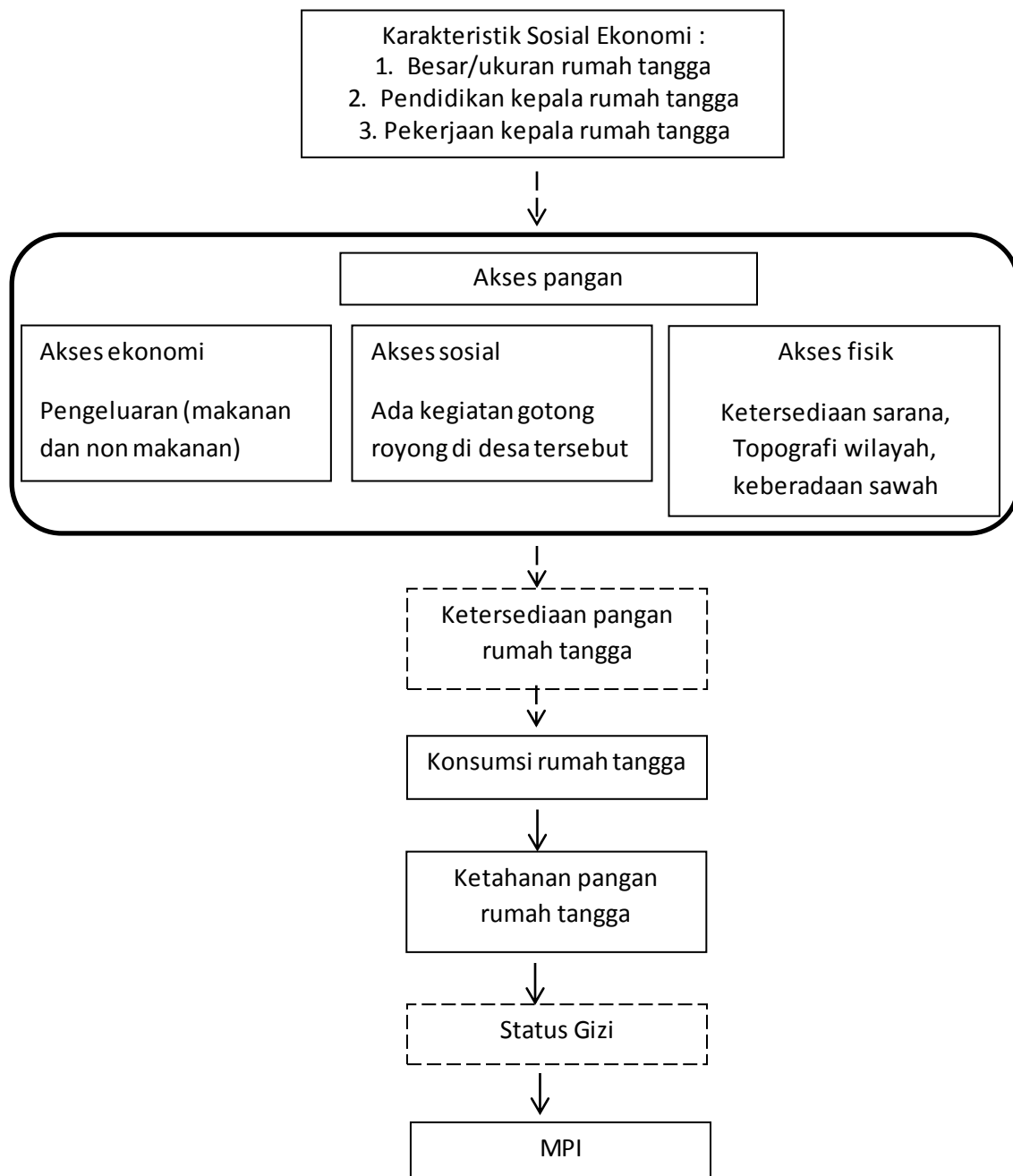
pangan keluarga.

Tingkat pendidikan kepala rumah tangga mempengaruhi ketahanan pangan secara tidak langsung, hal ini dapat dilihat jika kepala rumah tangga memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi maka kemungkinan kepala rumah tangga tersebut memperoleh pekerjaan yang layak cukup besar. Hal ini akan berdampak pada perolehan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Besar rumah tangga mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga, karena semakin besar rumah tangga tersebut maka resiko terjadinya kerawanan pangan dalam suatu rumah tangga akan semakin besar. Hal ini dikarenakan semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh rumah tangga tersebut, baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan non-pangan.

Akses terhadap pangan penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga. Akses pangan terdiri dari akses fisik, akses ekonomi dan akses sosial. Akses sosial termasuk didalamnya pengetahuan gizi ibu dan dukungan sosial. Pengetahuan gizi terkait dengan keputusan ibu dalam memilih jenis dan jumlah pangan yang akan dikonsumsi untuk anggota rumah tangga, semakin baik pengetahuan gizi ibu maka ketahanan pangan rumah tangga dapat dicapai. Dukungan sosial yang baik akan dapat memperkecil peluang suatu rumah tangga mengalami kerawanan pangan, karena adanya bantuan dari tetangga dalam upaya pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan emosional.

Di antara variabel-variabel tersebut, variabel sosial ekonomi rumah tangga akan mempengaruhi akses terhadap pangan. Bila akses terhadap pangan dapat tercapai dengan baik maka suatu rumah tangga dapat memenuhi kebutuhan pangan, sehingga tingkat konsumsi rumah tangga dapat terpenuhi. Tingkat konsumsi merupakan salah satu indikator pengukuran tingkat ketahanan pangan. Dengan demikian, bila tingkat konsumsi rumah tangga sudah terpenuhi maka dapat diketahui tingkat ketahanan pangan suatu rumah tangga adalah tahan pangan, begitupun sebaliknya. Bila tingkat konsumsi rumah tangga tidak terpenuhi maka rumah tangga tersebut berpeluang mengalami kerawanan pangan bahkan ketidaktahanan pangan. Bila rumah tangga tidak tahan pangan maka diasumsikan bahwa asupan gizinya kurang, sehingga menjadi tidak sehat atau akan termasuk miskin dalam dimensi kesehatan pada aspek penyusunan MPI (Gambar 2.3).



Keterangan gambar

□ : variabel yang diteliti

□ : variabel yang tidak diteliti

→ : hubungan yang diteliti

---→ : hubungan yang tidak diteliti

Gambar 2.3. Kerangka pemikiran (Modifikasi dari Eka Herdiana, 2009)

BAB 3 KONSEP DAN METODOLOGI

3.1. Konsep dan Teknik Pengukuran MPI

MPI pertama kali dikembangkan oleh OPHI dengan UNDP pada tahun 2010. Dimana tujuan dari MPI adalah untuk memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistic. Selama ini, indikator secara global yang banyak digunakan dalam menghitung angka kemiskinan adalah melalui pendekatan moneter seperti garis kemiskinan dengan batas USD. 1.25 *Purchasing Power Parity* (PPP), USD. 1.5 PPP atau melalui pendekatan konsumsi dasar (*basic need*) yang digunakan di Indonesia.

Amartya Sen (1980 & 2000) sudah lama sebenarnya mengkritik pendekatan kemiskinan dengan menggunakan analisis moneter. Menurut Amartya Sen, pendekatan tersebut hanya memotret sebagian kecil dari begitu besarnya persoalan kemiskinan. Persoalan kemiskinan bukan saja menyangkut kemampuan daya beli (*purchasing power parity*), pendapatan atau konsumsi tapi ada dimensi yang lebih luas dari kondisi kemiskinan. Ketika ada sebagian masyarakat tidak bisa akses terhadap pelayanan pendidikan dasar atau kesehatan dasar akibat ketidakmampuan dalam ekonomi maka itu bisa dikatakan miskin. Begitu juga terhadap kualitas dari standard kehidupan seperti rumah yang berlantaikan tanah, tidak adanya sanitasi yang baik, sumber energi untuk penerangan dan memasak yang tidak layak, maka ini merupakan bagian dari kemiskinan.

Bagi UNDP, MPI merupakan bagian yang terintegrasi dalam kerangka *Millenium Development Goals* (MDGs). Dimana setiap indikator MPI merupakan bagian dari target pencapaian MDGs. Timbulnya kekhawatiran secara global dalam penyelesaian masalah kemiskinan merupakan ide awal dari MPI. UNDP melihat bahwa memperluas indikator kemiskinan dan melihat kemiskinan secara multidimensi merupakan strategi awal dalam kerangka penanggulangan kemiskinan global. Selama ini persoalan kemiskinan dijebak oleh cakupan indikator yang sempit sehingga strategi penanggulangan kemiskinan menjadi sempit juga. Ada tiga dimensi yang dirujuk oleh UNDP dan OPHI dalam MPI.

Kemiskinan bertipologi lokal (DIY) merupakan inovasi metodologi penghitungan dengan mempertimbangkan beberapa dimensi. Dari aspek penyertaan beberapa dimensi dalam membangun satu indeks sebenarnya penghitungan kemiskinan semacam ini termasuk dalam penghitungan Kemiskinan Multidimensi (*Multidimension Poverty Index* atau MPI) yang sudah populer sebelumnya dan digunakan oleh UNDP dalam laporan

tahunannya. Kemiskinan multidimensi dilandasi pemikiran bahwa gambaran mengenai kemiskinan tidak cukup hanya direpresentasikan dengan kondisi keuangannya saja melainkan harus mempertimbangkan aspek lain yang setiap hari selalu bersentuhan yakni kondisi tempat tinggal dan lingkungan, aspek gizi/nutrisi, aspek pendidikan dan aspek-aspek lain.

Pemikiran luas tentang kemiskinan multidimensi seperti yang diungkap oleh Bourignon & Chakravarty, (2003) bahwa kemiskinan atau kesejahteraan seseorang tergantung pada variabel keuangan maupun non keuangan, oleh karena itu pengukuran kemiskinan harus didasarkan pada indikator-indikator pendapatan atau pengeluaran dan juga pada indikator-indikator non-income sehingga dapat mengidentifikasi aspek-aspek dari kesejahteraan atau kemiskinan yang tidak tertangkap oleh hanya variabel pendapatan. Laporan Bank Dunia dalam ikhtisarnya tentang kemiskinan di Indonesia mendukung pendapat ini dengan menyebutkan bahwa kemiskinan dari segi non-pendapatan adalah masalah yang lebih serius dibanding kemiskinan dari segi pendapatan. Menurut **World Bank (2007:37)**, apabila definisi kemiskinan diperluas hingga mencakup dimensi-dimensi lain kesejahteraan manusia, seperti konsumsi, pendidikan, kesehatan dan akses infrastruktur dasar yang memadai, maka kemiskinan tetap akan menjadi isu utama di Indonesia.

Beberapa ahli telah menawarkan alternatif penghitungan MPI dan salah satunya adalah Metode Alkire-Foster (AF) yang diadopsi oleh UNDP dalam laporan tahunannya. Yang jelas bedanya adalah jika dalam MPI logika penghitungannya adalah dengan menetapkan suatu cut-off dari total skor variabel yang diperoleh oleh individu penduduk sedangkan dalam penghitungan kemiskinan tipologi DIY sebaliknya adalah dengan menentukan miskin dengan menetapkan syarat-syarat pencapaian variabel tertentu.

UNDP menggunakan MPI sebagai laporan tahunan dimana penghitungan dengan Metode Alkire-Foster (AF) ini baru diterapkan pada tahun 2010 menggantikan indeks lain yakni Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) atau *Human Poverty Index* yang sudah digunakan sejak 1997. IKM atau HPI tidak menggunakan variabel pengeluaran maupun pendapatan dalam penghitungannya namun indeks ini dibangun dengan mempertimbangkan dimensi lain dari kemiskinan yang dianggap paling mendasar. Dimensi-dimensi tersebut antara lain hidup panjang dan kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Hidup panjang dan kesehatan diukur dengan probabilitas penduduk meninggal sebelum berumur 40 tahun. Pendidikan diukur dengan persentase

penduduk dewasa yang buta huruf. Standar hidup yang layak diukur dengan akses terhadap sumber air bersih, fasilitas kesehatan dan status gizi balita.

Dalam perkembangannya IKM digantikan oleh Indeks Kemiskinan Multidimensional atau *Multidimensional Poverty Index* (MPI) pada tahun 2010. MPI yang mulai dimunculkan dalam laporan pembangunan manusia UNDP merupakan ukuran kemiskinan multidimensional yang dihitung oleh Alkire dan Santos (2010). MPI menerapkan metoda penghitungan kemiskinan multidimensional terbaru yaitu *Alkire-Foster Methodology* yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2007). IKM menggunakan data level wilayah dalam membentuk indeksinya sehingga tidak mampu mengidentifikasi secara spesifik kemiskinan multidimensional yang dialami oleh individu ataupun rumah tangga (UNDP, 2010: 95). Dalam pengukuran kemiskinannya MPI menggunakan data level rumah tangga sehingga mampu mengetahui persentase penduduk yang mengalami kemiskinan dalam berbagai dimensi sehingga mampu memperbaiki kekurangan yang ada pada IKM.

Metoda ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan. Alkire dan Seth (2009) menyebutkan keunggulan metoda ini di antaranya:

- cocok dan tepat diterapkan pada data ordinal atau data yang bersifat kategorik;
- fokus pada kemiskinan dan deprivasi, memperlakukan setiap dimensi secara independen terhadap dimensi lain tanpa mengasumsikan substitutabilitas antardimensi;
- fleksibel untuk menerapkan pembobot yang setimbang atau berbeda pada dimensi yang berbeda tergantung pada kepentingan relatifnya;
- robust dalam mengidentifikasi individu termiskin dari penduduk miskin dengan menaikkan aggregate *cutoff point*;
- informatif bagi kebijakan karena mampu menunjukkan dimensi apa yang dominan mempengaruhi kemiskinan multidimensi pada wilayah tertentu ataupun pada kelompok penduduk tertentu.

3.1.1. Dimensi Kesehatan

Untuk dimensi kesehatan, MPI mengukur dengan menggunakan dua indikator yaitu gizi dan kematian anak. Pada konsepnya, dua indikator ini dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan dasar yang mutlak diakses oleh rumah tangga. Indikator gizi, MPI mengukur pada setiap anggota rumah tangga baik itu anak

atau orang dewasa. Untuk anak, pengukuran gizi mengacu pada standard MDGs yaitu melalui pendekatan berat badan berbanding usia anak. Anak dikatakan memiliki gizi kurang ketika berat badan berada pada dua atau lebih di bawah standar deviasi rata-rata populasi yang menjadi acuan. Sedangkan untuk orang dewasa, menggunakan pendekatan *Body Mass Index* (BMI). Dimana seorang dewasa dianggap kurang gizi ketika BMI lebih rendah dari 18.5.

Indikator lain dari dimensi kesehatan adalah kematian anak. Secara filosofi kesehatan, adanya anak yang meninggal merupakan cerminan dari ketidakmampuan terhadap kesehatan. Bisa saja kematian tersebut akibat penyakit atau kekurangan gizi. Penilaian mencakup semua umur anak. Ketika ada rumah tangga yang memiliki kematian anak baik satu, dua atau seterusnya maka rumah tangga tersebut masuk dalam satu poin penilaian dalam MPI.

3.1.2. Dimensi Pendidikan

Ada dua indikator dalam mengukur dimensi pendidikan yaitu lama sekolah (*years of schooling*) dan akses terhadap pendidikan (*attendance of school*). Dua indikator ini lebih mencerminkan kepada kemampuan masyarakat terhadap akses dasar pendidikan dan bukan mencerminkan kualitas dari pendidikan yang mereka dapati. Lama pendidikan dalam MPI dihitung minimal ada satu orang dalam rumah tangga yang telah menyelesaikan pendidikan minimal lima tahun. Sedangkan kehadiran anak di sekolah dihitung keberadaan anak usia sekolah yaitu kelas satu sampai delapan yang akses (hadir) dalam pendidikan.

3.1.3. Dimensi Standar Hidup

Standar hidup mencerminkan pola kehidupan keseharian dari masyarakat. Kemiskinan akan menjadikan masyarakat tidak dapat memenuhi kualitas standar dari kehidupan sesuai dengan MDGs. Indikatornya terdiri dari enam indikator. Pertama, air. Seseorang memiliki akses terhadap air minum bersih jika sumber air salah satu jenis berikut: pipa air, keran umum, sumur bor atau pompa, sumur terlindung, dilindungi semi atau air hujan, dan itu dalam jarak 30 menit berjalan kaki (pulang pergi). Jika gagal untuk memenuhi kondisi tersebut, maka rumah tangga dianggap kekurangan dalam akses terhadap air. Kedua, sanitasi. Seseorang dianggap memiliki

akses ke sanitasi, jika rumah tangga memiliki beberapa jenis toilet atau jamban, atau berventilasi baik atau toilet kompos, asalkan tidak dibagi. Jika rumah tangga tidak memenuhi kondisi tersebut, maka dianggap kekurangan dalam sanitasi. Ketiga, listrik. Seseorang dianggap miskin jika tidak memiliki akses listrik. Keempat, lantai rumah. Bahan lantai terbuat dari tanah, pasir atau kotoran dianggap miskin. Kelima, bahan bakar untuk memasak. Seseorang dianggap miskin bila dalam bahan bakar memasak, rumah tangga tersebut menggunakan arang atau kayu. Keenam, kepemilikan aset. Jika sebuah rumah tangga tidak memiliki lebih dari satu radio, TV, telepon, sepeda, sepeda motor atau kulkas, dan tidak memiliki mobil maka dianggap miskin. Secara umum indikator MPI dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Dimensi dan Indikator setiap Dimensi dalam MPI

3.1.4. Pengukuran MPI

MPI dihitung menggunakan bobot tertimbang dari dimensi dan indikator. Bobot dari dimensi ditimbang sama yaitu $\frac{1}{3}$ masing-masing dimensi. Dan masing-masing indikator dalam dimensi juga ditimbang sama. Sehingga didapatkan bobot indikator sebagai berikut: bobot indikator kesehatan yang terdiri dari dua indikator dinilai sebesar $\frac{1}{6}$, bobot pendidikan yang terdiri dari dua indikator dinilai $\frac{1}{6}$ dan bobot kualitas hidup yang terdiri dari enam indikator dinilai $\frac{1}{18}$.

Setiap orang yang dinilai dalam MPI dilihat dari indikator yang dinilai. Penilaiannya terdiri dari rentang 0-1. Ketika seseorang memenuhi penilaian

kemiskinan menurut indikator MPI maka dia dikenakan poin 1. Penilaian akan terus dilakukan pada setiap indikator. Setelah mendapatkan penilaian terhadap sepuluh indikator maka akan dihitung berdasarkan rumus seperti berikut:

$$Ci = I_1 W_1 + I_2 W_2 + \dots + I_n W_n$$

dimana $I_i = 1$ jika seseorang kena dalam indikator i dan $I_i = 0$ jika bukan. W_i adalah bobot dari indikator i dengan

$$\sum_{i=1}^n W_i = 1$$

Semua indikator dan dimensi dijumlahkan, lalu dicari rata-rata nilai. Seseorang dikatakan miskin ketika total rata-rata penilaian lebih kecil dari $1/3$. MPI adalah perkalian antara *multidimensional headcount ratio* (H) dengan *intensity of poverty* (A).

$$H = \frac{q}{n}$$

Dimana q adalah jumlah individu yang dikategorikan miskin secara multidimensional sedangkan n adalah total populasi.

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n Ci(k)}{q}$$

Dimana $Ci(k)$ adalah skor dari individu i dan q adalah jumlah individu yang mengalami kemiskinan multidimensional.

Sehingga

$$MPI = H \times A$$

3.2. Keterbatasan Data dan Aplikasi MPI

Dalam laporan UNDP dan OPHI (2011), mereka memberi kesempatan pada masing-masing negara untuk mengembangkan indikator MPI sesuai karakteristik kemiskinan yang terjadi di masing-masing negara. Indikator yang dipilih haruslah memenuhi standar yang tertuang dalam komponen MDGs/ SDGs. Bila ada indikator yang telah ditetapkan oleh UNDP dan OPHI tidak terdapat dalam sistem pendataan di suatu negara maka bisa dilakukan proksi terhadap indikator tersebut. Contohnya, gizi pada anak bisa diproksikan dengan cakupan imunisasi pada balita.

Implementasi MPI di Indonesia dihadapkan pada kendala data dan pemenuhan indikator standar MPI. Saat ini data yang betul-betul baik digunakan dalam menghitung MPI di Indonesia adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Beberapa komponen pertanyaan yang ada di Susenas mengarah pada MPI dan MDGs. Susenas rutin dilakukan setiap tahun oleh BPS. Dan sistem pendataannya cukup profesional dengan sampling yang besar dan mewakili setiap daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dengan Susenas perhitungan MPI dapat dilakukan setiap tahun. Tapi persoalannya adalah ada beberapa indikator MPI standard UNDP dan OPHI yang tidak terdapat dalam data Susenas.

Adanya keleluasaan dalam pengembangan indikator dalam MPI selagi tidak keluar dari konteks MPI dan MDGs menjadikan implementasi MPI di Indonesia agak sedikit berbeda. Secara dimensi tetap menggunakan tiga dimensi seperti kesehatan, pendidikan dan kualitas hidup. Tapi ada beberapa indikator yang sedikit berubah. Pertama, dimensi pendidikan. Ada satu indikator yang ditambahkan yaitu melek huruf (kemampuan membaca dan menulis). Bagi kami, indikator ini merupakan bagian dari MDGs sehingga perlu untuk dimasukkan sebagai salah satu indikator MPI. Selain itu, ketidakmampuan membaca masih menjadi problema terbesar bagi penduduk miskin di Indonesia. Padahal ini merupakan pelayanan pendidikan dasar yang seharusnya sudah universal menjangkau semua penduduk. Kedua, dimensi kesehatan. Untuk dimensi ini, hanya satu indikator yang tidak kami gunakan yaitu kematian bayi. Dalam Susenas, data kematian bayi yang bisa didapatkan secara tidak langsung dengan informasi data riwayat kelahiran seorang ibu. Kejadian kematian yang terjadi tidak diketahui dan juga ada peristiwa gempa bumi di DIY pada tahun 2006 juga

menimbulkan bias kejadian riwayat kematian seorang ibu, sehingga tidak dimasukkan dalam analisis ini.

Tabel 3.1. Variabel yang Digunakan Dalam Penghitungan Kemiskinan Multidimensional

Dimensi	Indikator/variabel	Rumah tangga Miskin jika	Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendidikan	Lama sekolah	Tidak ada anggota rumah tangga yang menempuh pendidikan 6 tahun atau lebih	1/9
	Partisipasi Sekolah	Terdapat anak usia sampai 14 tahun yang tidak bersekolah	1/9
	Melek huruf	Tidak ada anggota rumah tangga 15 tahun ke atas yang bisa baca tulis	1/9
Kesehatan dan Nutrisi	Konsumsi Kalori Rumah Tangga	Konsumsi kalori rumah tangga kurang dari 70% Angka Kecukupan Gizi	1/6
	Konsumsi Protein Rumah Tangga	Konsumsi protein rumah tangga per hari kurang dari 80 % Angka Kecukupan Gizi	1/6
Standar Hidup	Akses Listrik	Tidak mempunyai akses listrik	1/18
	Sanitasi	Sanitasi buruk	1/18
	Sumber air minum	Tidak mempunyai akses air minum bersih	1/18
	Jenis lantai	Jenis lantai tanah	1/18
	Bahan Bakar	Bahan bakar yang digunakan kayu bakar	1/18
	Kepemilikan aset	Tidak punya aset lebih dari 1 jenis, kecuali mobil	1/18

Sumber: Alkire dan Santos (2010), dimodifikasi

Dimensi Kemiskinan menurut Alkire-Foster adalah mencakup Pendidikan, Kesehatan/Nutrisi dan Standar Hidup. Dari dimensi-dimensi ini dipilihlah beberapa indikator dan variabel yang merepresentasikan dimensi tersebut. Pemilihan indikator/variabel, titik potong (*cutt-off*) tiap indikator kemiskinan, pembobot tiap dimensi/indikator dan *second cutoff* mengacu pada penelitian Alkire dan Santos (2010) dan juga pertimbangan ketersediaan data yang ada pada SUSENAS 2013 dan 2015 dengan beberapa modifikasi. Modifikasi terletak pada: pertama, titik potong

(*cutt-off*) kemiskinan indikator lama sekolah, kedua, indikator dimensi kesehatan dan ketiga, indikator kepemilikan asset rumah tangga. Selain dari ketiga modifikasi tersebut, penghitungan ini menggunakan indikator, titik potong (*cutt-off*) tiap indikator, pembobot dan *second cutoff* yang sama dengan Alkire dan Santos (2010). *Second cutoff* yang digunakan sebagai penentu akhir status kemiskinan multidimensi individu adalah $k=2,7$ atau setara dengan 30 persen dari total jumlah indikator. Artinya untuk dapat dikatakan sebagai miskin secara multidimensi seseorang harus terdeprivasi setidaknya 30 persen dari total indikator terboboti.

Modifikasi pertama, dalam penelitian ini rumah tangga dikatakan terdeprivasi pada indikator lama sekolah jika di dalam rumah tangga tersebut tidak ada anggota rumah tangga yang menempuh pendidikan 6 tahun atau lebih. Berbeda dengan Alkire dan Santos yang menggunakan batasan 5 tahun. Ada satu indikator yang ditambahkan yaitu melek huruf (kemampuan membaca dan menulis). Indikator ini merupakan bagian dari indikator MDGs sehingga perlu untuk dimasukkan sebagai salah satu indikator MPI. Selain itu, ketidakmampuan membaca menulis masih menjadi problema terbesar bagi penduduk miskin di Indonesia. Padahal ini merupakan pelayanan pendidikan dasar yang seharusnya sudah universal menjangkau semua penduduk.

Modifikasi kedua, Dimensi kesehatan dalam penelitian Alkire dan Santos (2010) terdiri dari indikator kematian anak dan kekurangan nutrisi yang diukur dengan *body mass index (BMI)* untuk individu dewasa dan *height for age* untuk anak-anak. Susenas tidak memuat pertanyaan mengenai kematian dan indikator nutrisi yang sama sehingga penelitian ini tidak menggunakan variabel tersebut. Indikator nutrisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah asupan gizi rumah tangga yang terdiri dari kalori dan protein. Kebutuhan energi (atau kalori) dapat dipenuhi melalui asupan karbohidrat, lemak, dan atau protein dalam makanan. Nutrisi yang tidak memadai dapat diakibatkan dari kurangnya makanan. Sebagai akibat dari malnutrisi, individu terpapar pada resiko morbiditas dan mortalitas yang meningkat dari perubahan pada fungsi organ akhir (Cerra FB, 1984). Kekurangan konsumsi gizi bagi seseorang dari standar minimum akan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan, aktivitas dan produktivitas kerja. Dalam jangka panjang kekurangan konsumsi pangan dari sisi jumlah dan kualitas (terutama pada balita) akan berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia (Ariningsih, 2008). Gizi yang terkandung dalam makanan merupakan unsur yang penting karena makanan adalah sumber energi dan

zat gizi yang utama bagi setiap orang. Tanpa makanan yang berkualitas baik dan dalam jumlah mencukupi kebutuhan, maka kemampuan maupun kesanggupan kerja para pekerja tidak optimal (Budiono S., 1991).

Titik potong (*cutt-off*) kemiskinan indikator konsumsi kalori dan protein dalam penelitian ini mengacu pada Kementerian Kesehatan (2010: 74). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 mengkategorikan individu sebagai mengkonsumsi kalori di bawah kebutuhan minimal jika mengkonsumsi kalori kurang dari 70 persen dari angka kecukupan kalori. Individu dikategorikan sebagai mengkonsumsi protein di bawah kebutuhan minimal jika mengkonsumsi protein kurang dari 80 persen dari angka kecukupan protein. Kecukupan kalori dan protein tersebut didasarkan pada “Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2004 bagi orang Indonesia” dalam Widya Karya Pangan dan Gizi (WNPG) VIII Tahun 2004. Kecukupan kalori dan protein menurut kelompok umur dan jenis kelamin individu dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2. Angka Kecukupan Kalori Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Berdasarkan AKG 2004

Kelompok Umur	Angka Kecukupan per hari	
	Kalori	Protein
(1)	(2)	(3)
Anak		
0-6 bulan	550	10
7-12 bulan	650	16
1-3 tahun	1.000	25
4-6 tahun	1.550	39
7-9 tahun	1.800	45
Laki-laki		
10-12 tahun	2.050	50
13-15 tahun	2.400	60
16-18 tahun	2.600	65
19-29 tahun	2.550	60
30-49 tahun	2.350	60
50-64 tahun	2.250	60
≥ 65 tahun	2.050	60
Perempuan		
10-12 tahun	2.050	50
13-15 tahun	2.350	57
16-18 tahun	2.200	50
19-29 tahun	1.900	50
30-49 tahun	1.800	50
50-64 tahun	1.750	50
≥ 65 tahun	1.600	50

Sumber: www.depkes.go.id, dimodifikasi

Kebutuhan kalori dan protein rumah tangga ditentukan dengan cara menjumlahkan kebutuhan kalori dan protein dari setiap anggota rumah tangga. Rumah tangga dikategorikan miskin pada indikator konsumsi kalori jika konsumsi kalori rumah tangga kurang dari 70 persen kebutuhan kalori rumah tangga. Sementara itu jika konsumsi protein rumah tangga kurang dari 80 persen kebutuhan protein maka rumah tangga dikategorikan miskin pada indikator konsumsi protein. Dengan teknik ini maka fluktuasi *dietary needs* masing-masing individu dalam rumah tangga sudah dipertimbangkan.

Modifikasi ketiga, variabel kepemilikan asset rumah tangga tidak digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan variabel asset tidak terdapat dalam Susenas 2013 sehingga tidak memungkinkan keterbandingan hasil antara tahun 2013 dan 2015.

3.3. Teknik Penghitungan MPI

Metoda Alkire-Foster menerapkan 2 tahapan dasar yaitu identifikasi dan agregasi. Identifikasi untuk menentukan siapakah yang dianggap sebagai individu miskin “who is the poor” dan agregasi berfokus pada “how many are poor”. Dalam mengidentifikasi individu miskin, metoda Alkire-Foster menerapkan garis kemiskinan/threshold/cutt-off ganda. Garis kemiskinan yang pertama adalah garis kemiskinan untuk masing-masing indikator, dan yang kedua adalah garis kemiskinan dimensi. Sementara itu tahapan agregasi dalam metoda Alkire-Foster mengadopsi ukuran FGT indeks yang disesuaikan (adjusted FGT index).

Dua tahapan dasar identifikasi dan agregasi dalam metoda Alkire-Foster dijabarkan ke dalam 12 langkah (Alkire dan Foster, 2009). Langkah 1-8 merupakan tahapan identifikasi, sedangkan langkah 9-12 merupakan tahapan agregasi. Secara ringkas, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut :

Langkah 1: Memilih unit analisis. Unit analisis dapat berupa individu atau rumah tangga dapat juga komunitas, atau unit lain.

Langkah 2: Memilih dimensi kemiskinan.

Langkah 3: Memilih indikator. Indikator pada masing-masing dimensi dipilih berdasarkan prinsip akurasi (menggunakan sebanyak mungkin indikator yang diperlukan sehingga analisis yang benar dapat memandu kebijakan) dan parsimoni (menggunakan indikator sesedikit mungkin untuk memastikan kemudahan analisis untuk tujuan kebijakan dan transparansi)

- Langkah 4: Menentukan Garis kemiskinan/*threshold/cutt-off*. Garis kemiskinan ditentukan untuk tiap indikator/variabel (merupakan *first cutt-off*).
- Langkah 5: Menerapkan Garis kemiskinan/*threshold/cutt-off*. Setiap unit analisis dapat diidentifikasi sebagai miskin atau tidak miskin pada masing-masing indikator/variabel. Jika *achievement* individu ke-*i* lebih kecil dari nilai garis kemiskinan pada indikator/variabel ke-*j*, maka individu ke-*i* tersebut dikatakan miskin pada indikator ke-*j*. Pada langkah ini *matrix achievement* ditransformasikan menjadi *matrix of deprivation* dengan menggunakan vektor baris garis kemiskinan. Pada langkah ini dapat juga diaplikasikan pembobot baik *equal* maupun *unequal*.
- Langkah 6: Menghitung jumlah deprivasi untuk setiap unit analisis. Setiap komponen g_{ij} dijumlahkan untuk setiap unit analisis sehingga akan terbentuk vektor kolom jumlah deprivasi.
- Langkah 7: menentukan garis kemiskinan kedua (*second cutt-off*). Garis kemiskinan kedua (*k*) ini merupakan jumlah indikator yang mana individu harus terdeprivasi untuk dapat dikatakan miskin secara multidimensi. *k* adalah bilangan integer $0 < k \leq d$ di mana *d* adalah jumlah indikator;
- Langkah 8: mengaplikasikan garis kemiskinan kedua (*second cutt-off*) untuk memperoleh himpunan individu miskin dan menyensor data dari individu non miskin. Individu ke-*i* dikatakan miskin jika $c_i \geq k$. Mulai dari langkah ini fokusnya adalah individu miskin sehingga seluruh informasi dari individu non miskin di ganti dengan nol (*censored matrix*);
- Langkah 9: menghitung nilai *Multidimensional Poverty Headcount* (*H*) dengan cara membagi jumlah individu miskin dengan total penduduk. *H* dapat diartikan sebagai proporsi individu miskin terhadap total penduduk;

$$H = \frac{q}{n}$$

di mana *q*: jumlah individu miskin dan *n*: jumlah total penduduk

H merupakan ukuran yang penting namun ukuran tersebut tidak berubah jika individu menjadi terdeprivasi dalam indikator yang lebih banyak, sehingga diperlukan ukuran lain.

- Langkah 10: menghitung nilai *average deprivation shared among poor* (*A*). Indikator *A* adalah rata-rata jumlah deprivasi yang dialami oleh orang miskin. Dihitung

dengan cara menjumlahkan proporsi total deprivasi yang dialami oleh orang miskin kemudian dibagi dengan jumlah total orang miskin;

$$A = \frac{\sum_{i=1}^q C_i(k)}{dq}$$

di mana $c_i(k)$: total deprivasi individu miskin

d : jumlah indikator

q : jumlah individu miskin

Ukuran A ini juga dapat diartikan sebagai intensitas dari kemiskinan multidimensi.

Langkah 11: menghitung *Adjusted Multidimensional Poverty Headcount Ratio* (M_0).

Indikator ini dihitung dengan cara mengalikan H dengan A ;

$$M_0 = H A$$

M_0 adalah tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan dengan intensitasnya. M_0 memenuhi aksioma *dimensional monotonicity*, artinya ketika individu atau seseorang mengalami deprivasi dalam indikator yang lebih banyak dari sebelumnya, M_0 akan meningkat. Berbeda dengan indikator H yang tidak berubah ketika individu menjadi terdeprivasi dalam indikator yang lebih banyak. M_0 akan mempunyai kemungkinan nilai berkisar antara 0 hingga 100 persen. M_0 akan bernilai 0 persen jika tidak ada satupun individu dalam suatu populasi mengalami deprivasi apapun. Sementara itu M_0 akan bernilai 100 persen jika seluruh individu dalam populasi mengalami deprivasi dalam semua indikator.

Langkah 12: mendekomposisi berdasarkan kelompok populasi ataupun berdasarkan dimensi sesuai keperluan analisis.

Di contohkan ada empat rumah tangga yang menjadi sample dalam MPI. Kita akan coba simulasikan perhitungan MPI dengan indikator MPI sesuai konteks DIY seperti berikut.

Tabel 3.3. Teknik Perhitungan MPI

Secara sederhana perhitungan MPI dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Dimensi dan Indikator	Individu dalam Rumah Tangga				Bobot
	1	2	3	4	
Jumlah anggota rumah tangga sampel	4	7	5	4	
Dimensi Pendidikan:					
Lama sekolah	0	0	1	1	1/9 = 0.111
Keberlanjutan Pendidikan	0	1	1	1	1/9 = 0.111
Melek Huruf	0	1	0	1	1/9 = 0.111
Dimensi Kesehatan:					
Asupan kalori < 70% AKE	1	1	0	0	1/6 = 0.167
Asupan protein < 80% AKP	1	1	1	1	1/6 = 0.167
Dimensi Standar Kualitas Hidup:					
Sanitasi	0	1	0	1	1/18 = 0.056
Air Bersih	0	1	0	0	1/18 = 0.056
Sumber Penerangan	0	0	0	0	1/18 = 0.056
Bahan Bakar/Energi untuk	0	1	0	1	1/18 = 0.056
Kondisi Lantai Rumah	0	1	0	1	1/18 = 0.056
Kepemilikan Aset	0	1	0	1	1/18 = 0.056
Skor	0.166	0.834	0.38	0.723	
Apakah masuk kategori miskin MPI ($c1 \geq 1/3 = 0.333$)	No	Ya	Ya	Ya	
Sensor skor (c1)	0	0.834	0.389	0.723	

Skor setiap orang dalam rumah tangga, contoh RT 1 adalah: $(2 \times 0.167) = 0.334$

Angka kemiskinan multidimensi (H) = $(7+5+4) : (4+7+5+4) = 0.80 \times 100 = 80\%$

Intensitas kemiskinan multidimensi (A) = $(0 \times 4) + (0.834 \times 7) + (0.389 \times 5) + (0.723 \times 4) : (7+5+4) = 0.667 \times 100\% = 66,7\%$

MPI = $H \times A = 0.80 \times 0.667 = 0.534 \times 100\% = 53,4\%$.

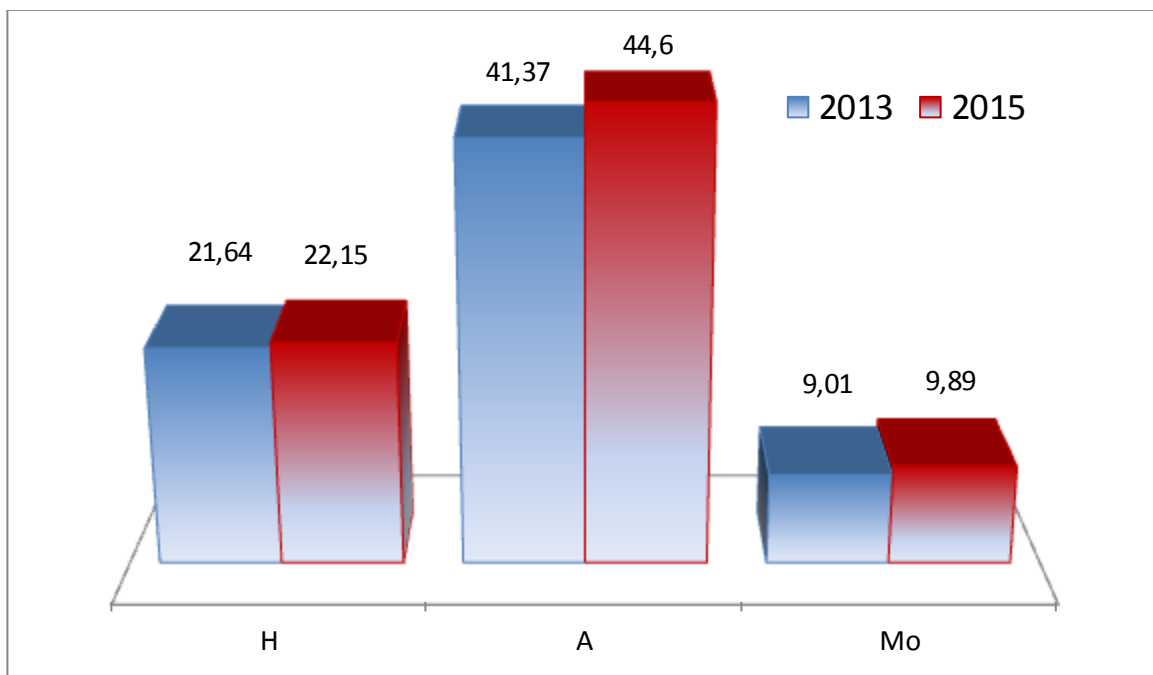
2.4. Sumber Data

Untuk studi ini, data perhitungan MPI menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 dan 2015. Data ini menjadi data dasar dalam mengembangkan dan menyusun MPI. Karena data Susenas ada setiap tahun maka analisis MPI dapat dibuat setiap tahun sehingga kelihatan tren perkembangan MPI. Selain itu juga digunakan data lain sebagai pendukung analisis yaitu data Podes 2014.

BAB 4. ANALISIS MPI DAN KETAHANAN PANGAN

4.1. MPI Daerah Istimewa Yogyakarta

Penghitungan kemiskinan multidimensi menggunakan metoda Alkire-Foster menghasilkan indikator persentase penduduk miskin secara multidimensi/*multidimensional poverty headcount* (H), rata-rata deprivasi yang dialami orang miskin (A) dan *adjusted multidimensional poverty headcount ratio* (M_0). Gambar 4.1 menampilkan hasil penghitungan ketiga indikator kemiskinan multidimensional untuk Provinsi D.I. Yogyakarta.



Gambar 4.1. Hasil Perhitungan Indeks Kemiskinan Multidimensi DIY, 2013 dan 2015

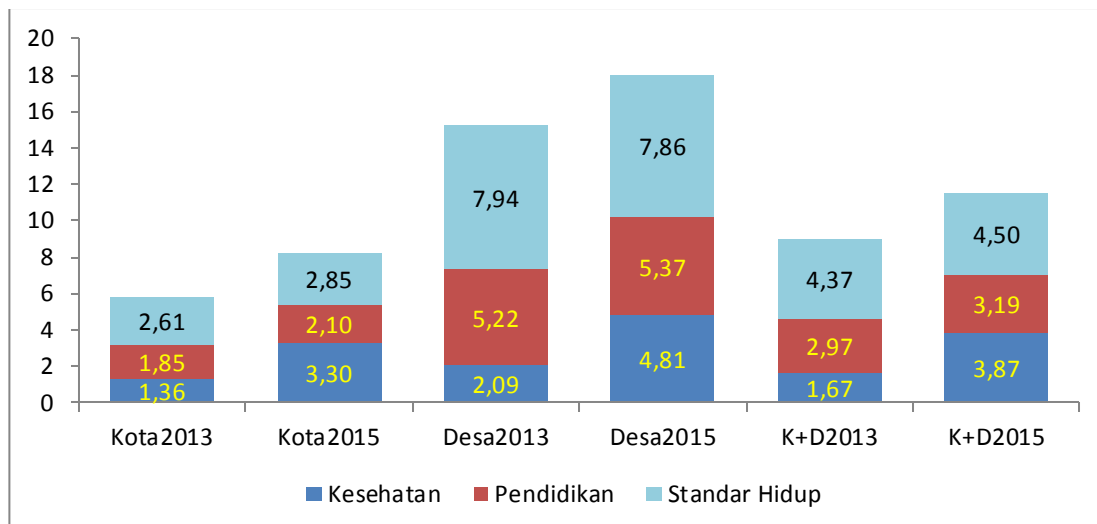
Indikator kemiskinan berupa proporsi penduduk miskin secara multidimensi (H) dapat menunjukkan insiden atau besarnya persentase penduduk miskin. Dari Gambar 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2013 persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta adalah sebesar 21,64 persen. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin tidak begitu banyak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2013, ada kecenderungan naik sekitar 0,51 poin menjadi 22,15 persen.

Indikator rata-rata deprivasi yang dialami oleh orang miskin (A) menggambarkan intensitas dari kemiskinan multidimensi. Nilai A yang semakin besar menunjukkan semakin banyak jumlah deprivasi yang dialami oleh orang miskin. Pada Gambar 4.1 juga terlihat pada tahun 2013 intensitas kemiskinan multidimensi yang dialami orang miskin adalah sebesar 41,37 persen. Selama tahun 2013-2015 intensitas kemiskinan multidimensi di D.I. Yogyakarta cenderung menunjukkan perubahan kurang bagus. Intensitas kemiskinan multidimensi mengalami peningkatan sebesar 3,23 poin menjadi 44,60 persen di tahun 2015.

Indikator kemiskinan multidimensi berikutnya adalah *adjusted multidimensional poverty headcount ratio* (M_0). Indikator M_0 merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemiskinan multidimensi yang sudah disesuaikan dengan intensitas kemiskinan multidimensi (A). Tingkat kemiskinan multidimensi di DIY adalah sebesar 9,01 persen. Sementara itu pada tahun 2015 angka tersebut sedikit meningkat menjadi 9,89 persen.

Dimensi standar hidup ada kecenderungan mempunyai kontribusi terbesar terhadap tingkat kemiskinan multidimensi dibandingkan dua dimensi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk masih banyak mengalami deprivasi dalam hal sanitasi yang layak, sumber air minum yang bersih, akses listrik yang memadai, sarana perumahan yang memenuhi standar yang baik, atau kepemilikan aset yang terbatas. Hanya di daerah perkotaan pada tahun 2015 yang kontribusi dimensi kesehatan yang lebih dominan.

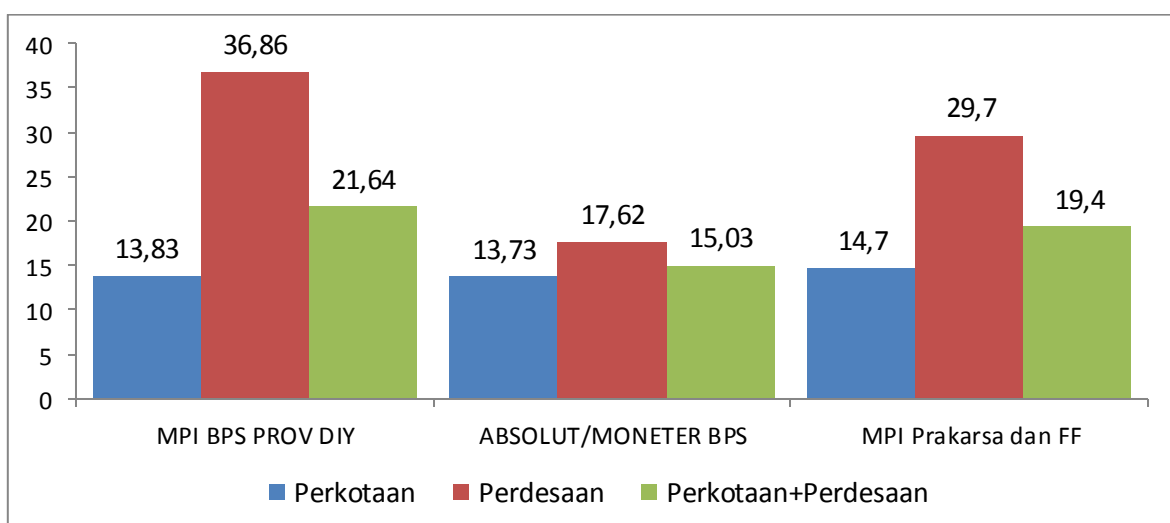
Karakteristik kemiskinan yang dilihat dari distribusi menurut dimensi penyusun MPI juga menunjukkan perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Walaupun karakteristik masih didominasi oleh dimensi standar hidup yang cukup besar, tapi ada perbedaan nilai dan distribusi dengan dimensi lainnya. Untuk dimensi standar hidup di perdesaan kontribusinya sebesar 52,07 persen atau berkontribusi sekitar 7,94 persen terhadap nilai MPI, sedangkan di perkotaan sebesar 44,85 persen dan secara total gabungan perkotaan dan perdesaan peran standar hidup sebesar 48,48 persen atau berkontribusi 4,37 persen terhadap nilai MPI (Gambar 4.2).



Gambar 4.2. Kontribusi Setiap Dimensi Terhadap Nilai MPI

4.1.1. MPI dan Indikator Kemiskinan BPS

Ada beberapa indikator kemiskinan yang bisa kita lihat di D.I. Yogyakarta seperti kemiskinan absolut/moneter dengan menggunakan pendekatan konsumsi (*basic need*), MPI hasil hitungan Prakarsa dan *Ford Foundation* (FF), selanjutnya MPI hasil hitungan BPS Provinsi DIY. Dengan memakai kemiskinan absolut/moneter, persentase penduduk miskin/angka kemiskinan pada tahun 2013 di D.I. Yogyakarta tercatat 15,03 persen. Bila menggunakan MPI Prakarsa dan Ford Foundation tercatat 19,4 persen, sedangkan berdasarkan penghitungan BPS Provinsi DIY tercatat lebih tinggi yaitu mencapai 21,64 persen.



Gambar 4.3. Perbandingan Indikator Kemiskinan di DIY, 2013

Dilihat dari karakteristik daerah perdesaan dan perkotaan, terdapat kesenjangan dalam angka kemiskinan maupun MPI. Angka kemiskinan perdesaan secara absolut/moneter BPS tercatat 17,62 persen dan perkotaan mencapai 13,73 persen, sedangkan sesuai indikator MPI Prakarsa dan FF angka kemiskinan perdesaan mencapai 29,7 persen dan di perkotaan sebesar 14,7 persen atau ada selisih 15,0 persen. Sedangkan nilai MPI hitungan BPS Provinsi DIY untuk perdesaan yaitu 36,86 persen sedangkan untuk perkotaan terdapat 13,83 persen. Hal ini menunjukkan adanya problema ketimpangan kemiskinan yang terjadi antara perkotaan dan perdesaan dengan menggunakan 3 cara penghitungan yang berbeda (Gambar 4.3).

4.2. MPI Menurut Daerah Tempat Tinggal dan Kabupaten/Kota

4.2.1. MPI Menurut Daerah Tempat Tinggal

Indikator kemiskinan berupa proporsi penduduk miskin secara multidimensi (H) dapat kita gunakan untuk menunjukkan insiden atau besarnya persentase penduduk miskin. Dari tabel 4.1 terlihat bahwa pada tahun 2013 persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta adalah sebesar 21,64 persen. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin tidak begitu banyak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2013, sedikit meningkat 0,51 poin menjadi 22,15 persen.

Persentase penduduk miskin secara multidimensi lebih rendah di daerah perkotaan daripada di daerah perdesaan. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin secara multidimensi di daerah perkotaan adalah sebesar 13,83 persen, jauh lebih rendah dibandingkan perdesaan yang sebesar 36,86 persen. Kondisi tersebut juga masih terjadi pada tahun 2015 di mana persentase penduduk miskin secara multidimensi di perdesaan masih lebih tinggi daripada di perkotaan (15,96 persen berbanding 34,45 persen).

Indikator rata-rata deprivasi yang dialami oleh orang miskin (A) menggambarkan intensitas dari kemiskinan multidimensi. Nilai A yang semakin besar menunjukkan semakin banyak jumlah deprivasi yang dialami oleh orang miskin. Pada tabel 4.1. terlihat pada tahun 2013 intensitas kemiskinan multidimensi yang dialami orang miskin adalah sebesar 41,37 persen. Jika dilihat menurut daerah maka akan didapati pola yang berbeda dengan indikator persentase penduduk miskin secara multidimensi di mana intensitas kemiskinan multidimensi di perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan daerah

perkotaan. Intensitas kemiskinan multidimensi di daerah perdesaan adalah sebesar 41,37 persen, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan daerah perkotaan yang sebesar 42,02 persen. Pada tahun 2015 intensitas kemiskinan di perdesaan (46,24 persen) meningkat cukup tajam sehingga intensitasnya menjadi lebih tinggi dibanding di perkotaan (42,89 persen).

**Tabel 4.1. Indikator-indikator Kemiskinan Multidimensi
D.I. Yogyakarta Berdasarkan Klasifikasi Daerah,
2013 dan 2015**

Daerah tempat tinggal	2013			2015		
	H	A	M ₀	H	A	M ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
D.I. Yogyakarta	21,64	41,37	9,01	22,15	44,64	9,89
Perkotaan	13,83	42,02	5,81	15,96	42,89	6,84
Perdesaan	36,86	41,37	15,25	34,45	46,24	15,93

Sumber: Susenas 2013 dan 2015, diolah

Selama tahun 2013-2015 intensitas kemiskinan multidimensi di Provinsi D.I. Yogyakarta cenderung menunjukkan banyak perubahan. Intensitas kemiskinan multidimensi mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,87 poin di daerah perkotaan menjadi 42,89 persen dan meningkat tajam sebesar 4,87 poin di perdesaan menjadi 46,24 persen. Secara total terjadi peningkatan intensitas kemiskinan multidimensi sebesar 3,27 poin menjadi 44,64 persen di tahun 2015.

Indikator kemiskinan multidimensi berikutnya adalah *adjusted multidimensional poverty headcount ratio* (M₀). Indikator M₀ merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemiskinan multidimensi yang sudah disesuaikan dengan intensitas kemiskinan multidimensi (A). Tingkat kemiskinan multidimensi pada tahun 2013 adalah sebesar 9,01 persen. Sementara itu pada tahun 2015 angka tersebut sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,88 poin menjadi 9,89 persen.

Sama halnya dengan indikator kemiskinan multidimensi yang lain, tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan lebih tinggi di daerah perdesaan daripada di daerah perkotaan. Pada tahun 2013, M₀ di perdesaan sebesar 15,25 persen sementara di perkotaan hanya 5,81 persen. Begitu pula dengan yang terjadi pada tahun 2015 di mana tingkat kemiskinan multidimensi masih lebih tinggi di daerah perdesaan daripada di perkotaan.

Ditinjau dari ketiga jenis indikator kemiskinan multidimensional maka dapat dikatakan bahwa kemiskinan di Provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2013 dan 2015 merupakan fenomena perdesaan. Hal tersebut nampak dari insiden kemiskinan multidimensi (H), intensitas kemiskinan multidimensi (A) dan tingkat kemiskinan multidimensi yang telah disesuaikan dengan intensitas kemiskinan (M_0) yang cenderung lebih besar di perdesaan daripada di perkotaan, baik tahun 2013 maupun 2015. Hanya intensitas kemiskinan multidimensi tahun 2013 yang tidak ada perbedaan yang jauh antara perkotaan dan perdesaan. Selain itu jika diamati bahwa jumlah penduduk miskin multidimensi lebih padat terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Pada tahun 2013 penduduk miskin multidimensi terdistribusi di perdesaan sebesar 62,08 persen. Begitu pula pada tahun 2015 penduduk miskin masih lebih padat terkonsentrasi di perdesaan.

Temuan tersebut sejalan dengan Dercon (2009) yang menyebutkan bahwa kemiskinan secara dominan masih merupakan fenomena perdesaan. Bahkan estimasi yang dilakukan oleh Ravallion, Chen dan Sangraula (2007) menyebutkan bahwa sekitar 76 persen penduduk miskin dunia tinggal di daerah perdesaan. Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada proporsi penduduk yang tinggal di daerah perdesaan yang hanya sebesar 58 persen. Kemiskinan di daerah perdesaan sering terkait dengan kurangnya akses rumah tangga terhadap sumber daya penting seperti kepemilikan aset, infrastruktur dan *human capital* (Bogale, Hagedorn dan Korf, 2005).

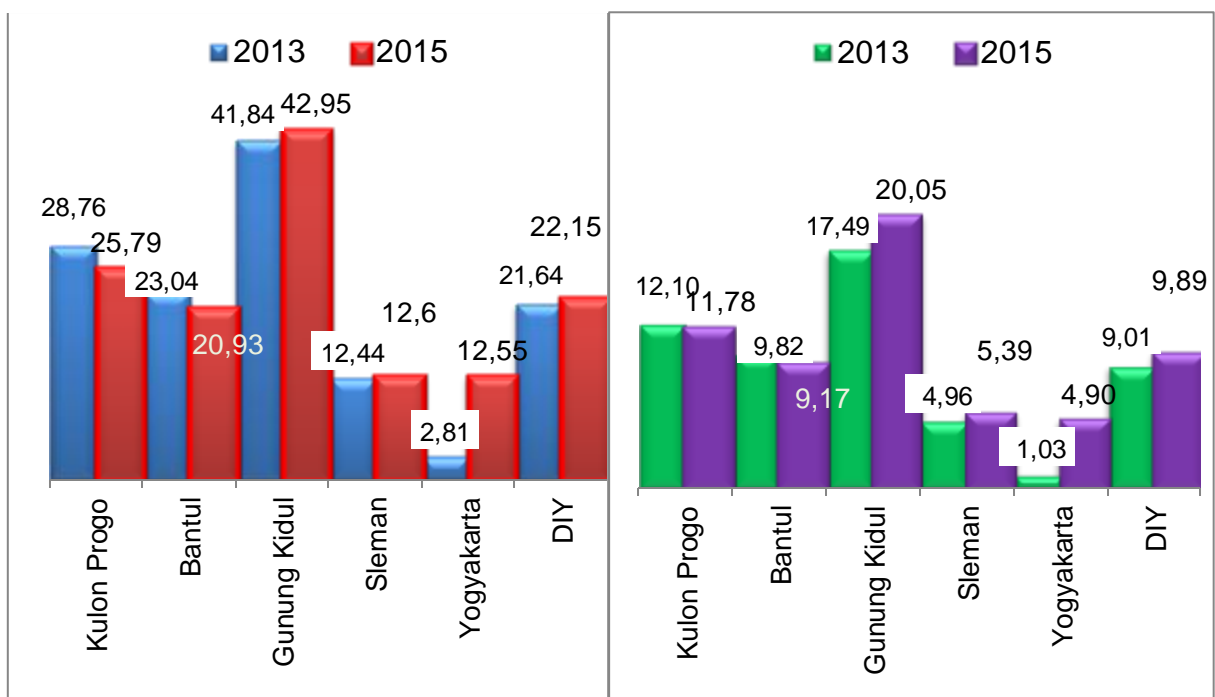
Dilihat dari karakteristik antara perdesaan dan perkotaan, terdapat kesenjangan dalam angka kemiskinan dan nilai MPI. Untuk perdesaan angka kemiskinan sesuai indikator MPI pada tahun 2015 mencapai 34,45 persen sedangkan di perkotaan sebesar 15,96 persen atau ada selisih 18,49 persen. Sedangkan nilai MPI untuk perdesaan yaitu 15,93 persen, sedangkan di perkotaan hanya 6,84 persen. Ini menunjukkan adanya problema ketimpangan kemiskinan yang terjadi antar kota dan desa.

Demikian pula bila kita gunakan angka kemiskinan absolut, maka fenomenanya sama. Penduduk miskin relatif lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan. Pada Maret 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta ditemukan dari 14,91 persen penduduk miskin, yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan sebesar 17,85 persen, sedangkan di wilayah perkotaan hanya 13,43 persen.

4.2.2. MPI Menurut Kabupaten/Kota

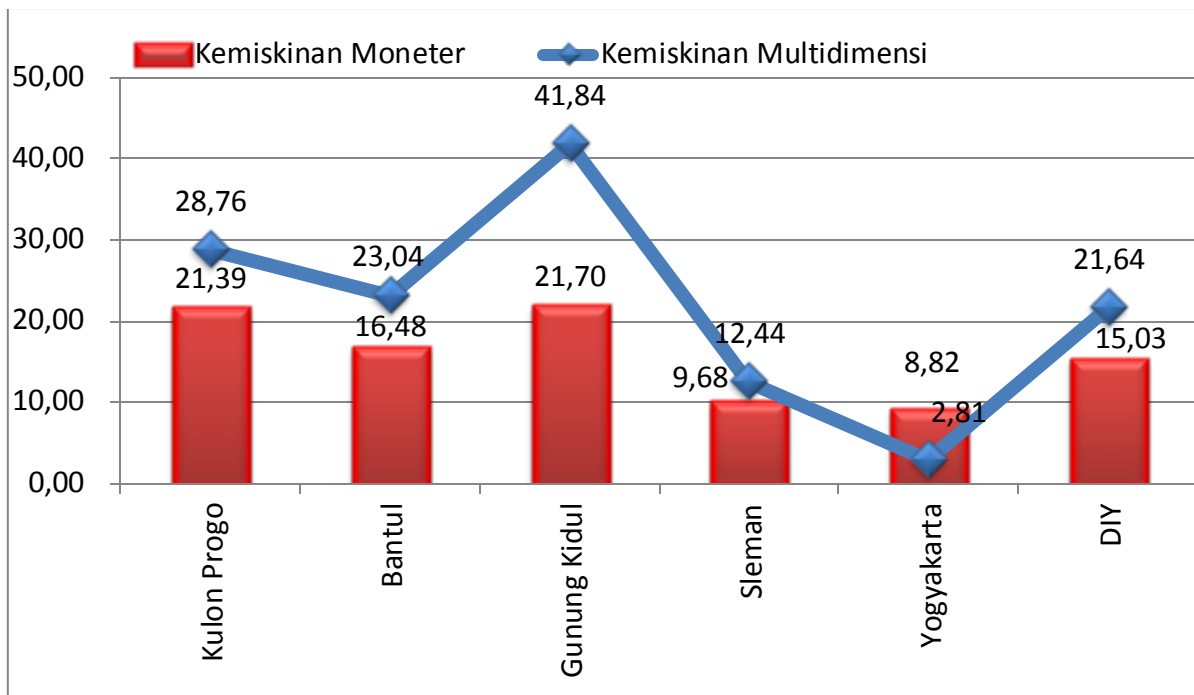
Dari penghitungan MPI menurut kabupaten/kota menunjukkan adanya variasi

nilai. *Head count* (H) kemiskinan multidimensi yang tertinggi terjadi di Kabupaten Gunung Kidul dengan persentase kemiskinan mencapai 42,95 persen pada tahun 2015 dan terendah di Kota Yogyakarta dengan persentase kemiskinan mencapai 12,55 persen. Sedangkan untuk nilai Mo dari MPI, nilai MPI untuk Kabupaten Gunung Kidul adalah 20,05 persen sedangkan MPI untuk Kota Yogyakarta adalah 4,90 persen. Sangat jauh terjadi ketimpangan antara nilai terendah dengan nilai tertinggi. Ini menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta ketimpangan antar daerah terutama dalam hal kemiskinan multidimensi cukup besar. Dari persentase penduduk miskin menurut MPI, nilai terbesar berada di Kabupaten Gunung Kidul, diikuti Kabupaten Kulon Progo.



Gambar 4.4. Headcount (H) dan MPI (Mo) menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013 & 2015

Ketimpangan angka kemiskinan juga sudah tertangkap pada angka kemiskinan moneter dari BPS. Dua kabupaten yaitu Kabupaten Gunung Kidul dan Kulon Progo memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dan lebih besar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di DIY. Kondisi geografis dengan pegunungan kapur (karst) tidak seberuntung daerah lain yang mendapat limpahan kesuburan dari Gunung Merapi, di samping angka pertumbuhan ekonomi di kedua daerah tersebut yang tidak tinggi.



Gambar 4.5. Perbandingan Headcount (H) dan MPI menurut Kabupaten/Kota di DIY, Tahun 2013

Terlihat jelas bahwa daerah-daerah dengan status administratif kota dan daerah yang berbatasan dengan ibukota provinsi merupakan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin moneter dan multidimensi yang relatif lebih rendah daripada daerah lain. Kedekatannya dengan pusat pemerintahan dan ekonomi yang memiliki berbagai kelebihan fasilitas memungkinkan hal tersebut untuk terjadi. Hal ini mengindikasikan terjadinya *urban bias* di DIY.

4.3. MPI Menurut Karakteristik Sosial Ekonomi

4.3.1. MPI Menurut Lapangan Usaha KRT

Bila dikelompokkan menurut sektor lapangan usaha KRT, MPI tahun 2013 dan 2015 yang tertinggi berada di sektor pertanian (A) dengan nilai sebesar 17,88 persen dan 18,96 persen. Sedangkan yang paling rendah berada di sektor jasa (S) yang hanya sebesar 4,07 persen dan 5,51 persen.

Tabel 4.2. Perbandingan MPI berdasarkan Lapangan Usaha KRT di DIY, Tahun 2013 dan 2015

Lapangan Usaha KRT	2013			2015		
	H	A	M ₀	H	A	M ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	21,64	41,37	9,01	22,15	44,64	9,89
A	43,09	41,49	17,88	41,01	46,24	18,96
M	23,39	43,76	10,23	23,54	44,56	10,49
S	10,12	40,25	4,07	12,99	42,40	5,51
Tidak bekerja	15,42	37,63	5,80	12,47	41,90	5,22

4.3.2. MPI Menurut Pendidikan Tertinggi ART

Bila dikelompokkan menurut pendidikan tertinggi ART, MPI tahun 2013 dan 2015 yang tertinggi pada pendidikan SD ke bawah dengan nilai sebesar 23,68 persen dan 22,05 persen. Sedangkan yang paling rendah berada pada tingkat pendidikan SLA ke atas yang hanya sebesar 5,96 persen dan 6,32 persen.

Tabel 4.3. Perbandingan MPI menurut Pendidikan Tertinggi ART di DIY,
Tahun 2013 dan 2015

Pendidikan tertinggi ART	2013			2015		
	H	A	M ₀	H	A	M ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	21,64	41,37	9,01	22,15	44,64	9,89
SD ke bawah	56,70	41,76	23,68	47,12	46,80	22,05
SLP	30,30	42,70	12,94	37,00	45,22	16,73
SLA+	14,51	41,06	5,96	14,64	43,17	6,32

4.3.3. MPI Menurut Kuantil Pengeluaran

Bila dikelompokkan menurut kuantil pengeluaran, MPI terbesar tahun 2013 dan 2015 berada pada kuantil pertama atau 20 persen dengan pengeluaran per kapita terendah sebesar 23,33 persen dan 28,76 persen. MPI Kuantil 2 sampai dengan kuantil 4 mempunyai nilai antara 1 - 11 persen dan MPI kuantil 5 hanya berkisar 0,8 - 1,04 persen.

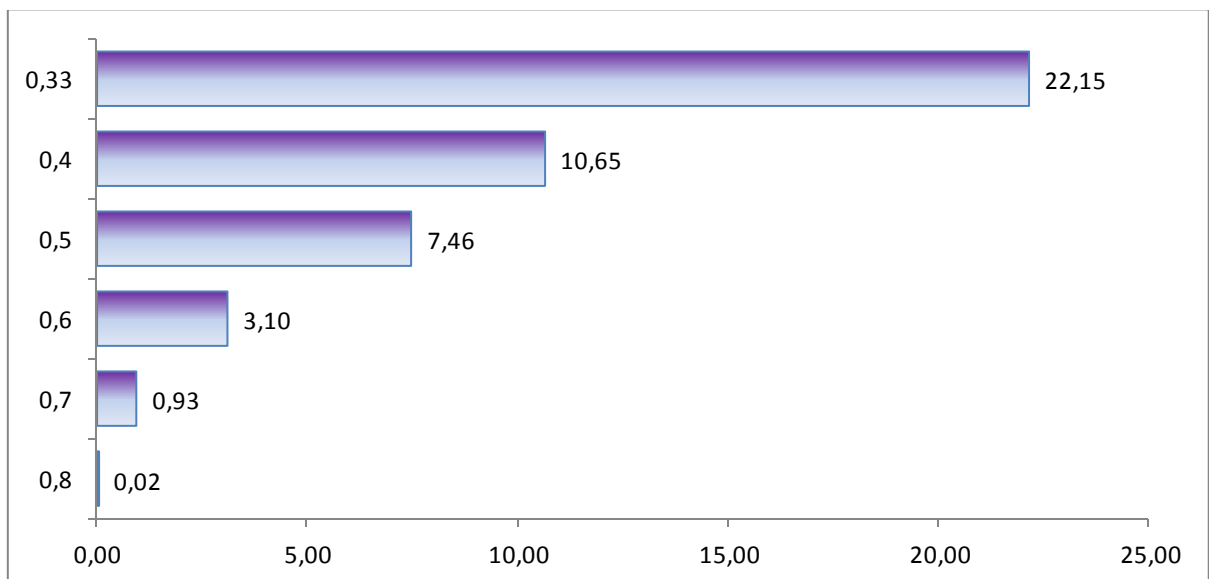
Tabel 4.4. Perbandingan MPI menurut kuantil Pengeluaran di DIY, Tahun 2013 dan 2015

Kuantil Pengeluaran	2013			2015		
	H	A	M ₀	H	A	M ₀
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total	21,64	41,37	9,01	22,15	44,64	9,89
Q1	52,40	44,52	23,33	45,49	48,35	28,76
Q2	25,61	39,26	10,05	25,32	41,48	10,50
Q3	14,13	38,38	5,42	13,73	36,81	5,05
Q4	8,28	36,78	3,05	4,45	39,04	1,74
Q5	2,22	39,82	0,88	2,60	40,10	1,04

4.4. Intensitas Kemiskinan Menurut MPI

Batas garis kemiskinan menurut MPI adalah ketika nilai lebih besar sama dari 33 persen. Ketika individu mendapatkan nilai skor lebih dari 33 persen maka dia masuk kategori miskin. Untuk melihat kecenderungan intensitas maka bisa dikelompokkan nilai dari 33 persen sampai 80 persen. Terlihat bahwa dengan naiknya indikator menjadi 40 persen maka angka kemiskinan (*headcount*) menjadi 10,65 persen. Dan ketika dinaikkan lagi menjadi 50 persen, angka kemiskinan (*headcount*) menjadi tinggal 7,46 persen dan seterusnya.

Gambar 4.6. Intensitas Kemiskinan menurut MPI di DIY Tahun 2015



Sumber: Susenas 2015 (diolah)

4.5. Hubungan MPI dengan Indikator Kemiskinan Absolut

Ada perubahan struktur kemiskinan bila MPI dibandingkan dengan indikator kemiskinan moneter yang dikeluarkan oleh BPS. Akan terdapat empat kategori yang bisa dikembangkan. Pertama, merupakan penduduk yang tidak miskin menurut kedua ukuran kemiskinan tersebut. Kedua, penduduk miskin yang dicakup oleh kedua ukuran kemiskinan tersebut. Ketiga dan keempat, kategori penduduk yang hanya dicakup di salah satu ukuran kemiskinan. Misalnya termasuk penduduk miskin secara moneter tetapi tidak masuk penduduk miskin secara MPI, atau sebaliknya.

Hasil pengukuran kemiskinan multidimensional dan moneter dapat digabungkan dengan membuat matriks untuk menggambarkan adanya *mismatch* kategori kejadian kemiskinan yang ada. Pengukuran kemiskinan yang dilihat tidak hanya dengan dimensi moneter saja tetapi secara multidimensional pula. Dengan demikian didapatkan pengklasifikasian penduduk yang tidak miskin secara moneter namun masih mungkin mengalami deprivasi pada berbagai dimensi kemiskinan yang lain. Pada tahun 2013 didapati 12,75 persen penduduk yang tidak miskin secara moneter namun masuk kategori miskin secara multidimensional dan terdapat 7,76 persen penduduk miskin secara moneter namun tidak miskin secara multidimensional.

Hasil penghitungan kemiskinan multidimensional dan moneter pada tahun 2013 dan 2015 mencatat terdapat secara berurutan sekitar 8,88 dan 10,05 persen penduduk yang masuk kategori miskin pada kedua metode pengukuran tersebut. Sementara sekitar 70-72 persen masuk kategori tidak miskin. Dengan demikian secara relatif terdapat sekitar 28 persen penduduk DIY yang masuk kategori miskin. Terdapat sekitar 12,10 persen penduduk yang dikategorikan miskin secara multidimensi tetapi secara ukuran moneter tidak miskin pada tahun 2015. Demikian pula terdapat 6,18 persen penduduk DIY yang miskin secara moneter tetapi tidak miskin secara ukuran multidimensi.

Perbedaan ini merupakan implikasi dari makin luasnya indikator kemiskinan menurut MPI. Ini menunjukkan bahwa keterwakilan model pengukuran kemiskinan yang dilakukan BPS masih kurang lengkap memotret persoalan kemiskinan. Justru dengan MPI yang memasukkan berbagai dimensi kemiskinan maka akan lebih bisa menjelaskan persoalan kemiskinan, meskipun juga dapat ditunjukkan bahwa ukuran moneter tetap diperlukan. Ada daerah yang secara indikator moneter rendah angka kemiskinannya karena diukur dari jumlah konsumsi tapi ketika dimensi pendidikan, kesehatan dan standar hidup diperluas ternyata ada persoalan-persoalan kemiskinan yang muncul. Sehingga MPI merupakan alternatif terbaik dalam melihat dimensi dan persoalan kemiskinan secara lebih luas.

Tabel 4.5. Status kemiskinan Multidimensional dan Moneter Tahun 2013 & 2015

Status kemiskinan 2015	Multidimensi Not Poor	Multidimensionally Poor
Moneter Not Poor	71,67	12,10
Moneter Poor	6,18	10,09
Status kemiskinan 2013	Multidimensi Not Poor	Multidimensionally Poor
Moneter Not Poor	70,60	12,75
Moneter Poor	7,76	8,88

4.6. Ketahanan Pangan Rumah Tangga

4.6.1. Kerawanan Pangan

Pengukuran derajat ketahanan pangan rumah tangga dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu : (1) tahan pangan; (2) rentan pangan; (3) kurang pangan; dan (4) rawan pangan. Untuk mengukur derajat ketahanan pangan tingkat rumah tangga tersebut digunakan klasifikasi silang dua indikator ketahanan pangan, yaitu proporsi pengeluaran makanan dan kecukupan konsumsi energi (Kkal). Tabel 4.6. berikut ini menyajikan distribusi rumah tangga menurut derajat ketahanan pangan di D.I. Yogyakarta, tahun 2015.

Tabel 4.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Derajat Ketahanan Pangan dan Status Tempat Tinggal di D.I. Yogyakarta Tahun 2015

Derajat Ketahanan Pangan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tahan Pangan	63,47	40,37	56,15
Rentan Pangan	13,65	39,49	21,84
Kurang Pangan	20,36	7,66	16,33
Rawan Pangan	2,52	12,47	5,67

Sumber : Susenas Konsumsi Maret 2015, diolah

Hasil analisis berdasar Susenas Maret 2015 memperlihatkan bahwa masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan sebanyak 5,67 persen. Sementara itu, rumah tangga yang tergolong tahan pangan mencapai 56,15 persen dan rumah tangga rentan pangan sebesar 21,84 persen. Kelompok rentan pangan menurut kriteria yang ditetapkan merupakan kelompok yang secara ekonomi (pendekatan di proksi dari proporsi pengeluaran pangan) termasuk kelompok kurang sejahtera, namun dari sisi konsumsi energi memenuhi syarat kecukupan. Hal ini dapat dikatakan terkait dengan pola konsumsi dan kebiasaan makan dari kelompok rumah tangga tersebut. Data mendukung bahwa kelompok rentan pangan mengkonsumsi pangan sumber karbohidrat (khususnya beras dan umbi-umbian) relatif tinggi dibanding kelompok lainnya (Saliem dkk., 2001).

Umumnya pangan sumber karbohidrat memiliki kandungan energi (Kkal) yang tinggi, namun tingginya konsumsi pangan sumber karbohidrat pada kelompok rentan pangan ini tidak diikuti oleh konsumsi sumber pangan lain secara seimbang. Dari sisi gizi, untuk memperoleh kondisi tubuh yang sehat diperlukan komposisi beragam zat gizi secara cukup dan seimbang. Oleh karena itu, perlu upaya penyadaran dan peningkatan pengetahuan pangan dan gizi secara intensif. Mengingat kelompok ini secara ekonomi kurang mampu, maka upaya peningkatan pendapatan untuk mampu mengakses pangan sumber protein, vitamin dan mineral secara baik perlu lebih digalakkan.

Kelompok kurang pangan proporsinya juga relatif besar yakni mencapai 16,37 persen. Kelompok ini merupakan golongan dari sisi ekonomi relatif mampu untuk mengkonsumsi pangan, namun dari indikator gizi termasuk kurang (konsumsi energi kurang dari syarat kecukupan). Oleh karena itu, penyadaran dan peningkatan pengetahuan

pangan dan gizi, terutama tentang pola konsumsi pangan yang beragam dan seimbang perlu mendapat prioritas.

Apabila indikator yang digunakan hanya indikator ekonomi (proksi dari proporsi pengeluaran pangan) dengan kriteria jika proporsi pengeluaran pangan tinggi (lebih dari 60 persen pengeluaran total), maka kelompok tersebut merupakan golongan yang relatif kurang sejahtera. Penggunaan indikator tunggal tersebut mengklasifikasikan kelompok yang tidak tahan pangan adalah kelompok rentan pangan dan rawan pangan. Sehingga proporsi rumah tangga tidak tahan pangan di D.I. Yogyakarta sekitar 27,51 persen pada tahun 2015.

Sementara itu, bila menggunakan indikator tunggal dari kecukupan konsumsi energi, sebagai proksi dari peubah gizi, maka kelompok rumah tangga dengan konsumsi energi ≤ 80 persen dari syarat kecukupan merupakan kelompok yang tidak tahan pangan. Dengan kategori tersebut, maka kelompok kurang pangan dan rawan pangan tergolong tidak tahan pangan, dengan demikian maka proporsi kelompok rumah tangga tidak tahan pangan di D.I. Yogyakarta tahun 2015 sekitar 22 persen.

4.6.2. Faktor Pengaruh Ketahanan Pangan dan MPI

Pengetahuan tentang distribusi rumah tangga menurut derajat ketahanan pangan baru dapat memberikan informasi besarnya proporsi rumah tangga menurut derajat ketahanan pangan secara agregat. Oleh karena itu identifikasi ciri – ciri atau karakteristik masing – masing kelompok rumah tangga menurut derajat ketahanan pangan dapat memperjelas tentang kondisi ketahanan rumah tangga tersebut. Tabel 4.7 berikut ini menggambarkan karakteristik rumah tangga di D.I. Yogyakarta tahun 2015 menurut derajat ketahanan pangan.

Tabel 4.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Karakteristik Determinan dan Derajat Ketahanan Pangan di D.I. Yogyakarta Tahun 2015

Karakteristik Determinan	Tahan Pangan	Rentan Pangan	Kurang Pangan	Rawan Pangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah ART 7 orang atau lebih	46,54	17,60	26,45	9,42
Pendidikan terakhir KRT SD ke bawah	38,15	34,08	16,83	10,94
Lapangan Usaha KRT di Pertanian	35,03	41,13	11,23	12,62
Umur KRT 60 tahun ke atas	50,59	27,40	14,37	7,64
Rumah tangga pada Kuantil Pengeluaran Kelompok I	13,44	33,08	27,14	26,33

Sumber : Susenas Konsumsi Maret 2015, diolah

Pada tabel 4.7 di atas tampak bahwa rumah tangga dengan umur kepala rumah tangga 60 tahun ke atas dominan kelompok tahan pangan. Yang tidak tahan pangan persentase terbesar pada kelompok rentan pangan yang mencapai 27,40 persen. Persentase yang cukup besar pada kelompok rentan pangan terjadi juga pada rumah tangga dengan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (KRT) SD ke bawah, pada rumah tangga dengan lapangan usaha utama KRT di pertanian, dan rumah tangga pada kuantil pengeluaran kelompok I (20 persen rumah tangga terendah). Kelompok kurang pangan (kelompok yang memiliki tingkat ekonomi relatif mampu, tetapi konsumsi gizi tergolong kurang) tampak menonjol pada rumah tangga dengan ukuran besar atau jumlah anggota rumah tangga (ART) 7 orang atau lebih.

Bila kita kaitkan atau korelasikan aspek akses ekonomi, akses sosial, maupun akses fisik terhadap ketidaktahanan pangan rumah tangga pada tingkat kabupaten/kota dengan korelasi Spearman ada hubungan menarik sebagai berikut:

- Ada hubungan yang signifikan antara akses ekonomi yaitu pengeluaran perkapita sebulan terhadap kerentanan dan kurang pangan, tetapi tidak signifikan terhadap rawan pangan. Pengeluaran per kapita sebulan punya hubungan negatif terhadap rentan pangan, tetapi punya kecenderungan hubungan positif terhadap kurang pangan.
- Tidak ada hubungan yang jelas antara akses sosial terhadap ketidaktahanan pangan rumah tangga. Dalam hal ini akses sosial ditunjukkan dengan persentase desa yang masih ada kegiatan gotong royong.

- Ada hubungan negatif yang signifikan akses fisik yaitu ketersediaan minimarket terhadap kerentanan dan kerawanan pangan, tetapi tidak signifikan terhadap kurang pangan. Ketersediaan warung kelontong tidak ada hubungan yang signifikan terhadap ketidaktahanan pangan rumah tangga.
- Topografi desa/kelurahan tempat tinggal yaitu berupa lereng/puncak gunung juga ada hubungan positif yang signifikan terhadap rentan dan kurang pangan rumah tangga.

BAB 5. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Indikator kemiskinan berupa proporsi penduduk miskin secara multidimensi dapat menunjukkan insiden atau besarnya persentase penduduk miskin. Pada tahun 2013 persentase penduduk miskin D.I. Yogyakarta adalah sebesar 21,64 persen. Pada tahun 2015 persentase penduduk miskin tidak begitu banyak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2013, ada kecenderungan naik sekitar 0,51 poin menjadi 22,15 persen. Selama tahun 2013-2015 intensitas kemiskinan multidimensi di D.I. Yogyakarta cenderung menunjukkan perubahan kurang bagus. Intensitas kemiskinan multidimensi mengalami peningkatan sebesar 3,23 poin dari 41,37 persen pada tahun 2013 menjadi 44,60 persen di tahun 2015. Tingkat kemiskinan multidimensi yang sudah disesuaikan dengan intensitas kemiskinan multidimensi (A). Tingkat kemiskinan multidimensi di DIY adalah sebesar 9,01 persen. Sementara itu pada tahun 2015 angka tersebut sedikit meningkat menjadi 9,89 persen.
2. Hasil temuan analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a) Kemiskinan yang diukur hanya pada dimensi moneter saja dapat menyebabkan pengklasifikasian penduduk yang tidak miskin secara moneter namun masih mengalami deprivasi pada berbagai dimensi kemiskinan yang lain, demikian sebaliknya.
 - b) Kemiskinan di DIY pada tahun 2013 dan 2015 merupakan fenomena perdesaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan lebih tingginya seluruh angka indikator kemiskinan moneter (P0, P1, P2) dan indikator kemiskinan multidimensi (H, A, M0) di perdesaan daripada di perkotaan sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi kemiskinan di perdesaan lebih buruk daripada di perkotaan.
 - c) Dimensi standar hidup merupakan kontributor terbesar terhadap tingkat kemiskinan multidimensi di daerah perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk daerah perdesaan lebih banyak mengalami deprivasi dalam hal sanitasi yang layak, sumber air minum yang bersih, akses listrik yang memadai, sarana perumahan yang memenuhi standar yang baik.
 - d) Daerah dengan status administratif kota dan daerah yang dekat dengan ibukota provinsi (pusat pemerintahan) merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin multidimensi maupun moneter yang relatif lebih rendah dibanding dengan

kabupaten/kota lain. Hal ini mengindikasikan terjadinya urban bias di daerah penelitian.

3. Penurunan persentase penduduk miskin moneter yang terjadi selama tahun 2013-2015 tidak diikuti oleh penurunan persentase penduduk miskin multidimensi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pendapatan atau pengeluaran per kapita penduduk selama periode 2013-2015 tidak sepenuhnya mampu ditransformasikan menjadi peningkatan *capabilities* dalam pendidikan, kesehatan maupun standar hidup yang lebih baik.

5.2. Saran

1. Perlunya **mempertimbangkan dimensi lain** dari kemiskinan dalam upaya pengentasan kemiskinan selain dimensi moneter saja.
2. Dalam upaya pengentasan kemiskinan, **daerah perdesaan harus menjadi prioritas utama**, mengingat wilayah ini mempunyai kondisi kemiskinan yang lebih buruk daripada daerah perkotaan. Program pemerintah yang telah ada, seperti raskin, Bantuan Operasional Sekolah (di bidang pendidikan), dll, **perlu didukung oleh bentuk program-program yang bersifat membenahi infrastruktur penunjang perbaikan standar hidup** seperti penyediaan akses air bersih, dan meningkatkan kondisi sanitasi terutama di wilayah perdesaan. Hal tersebut mengingat dimensi standar hidup merupakan kontributor terbesar tingkat kemiskinan multidimensi di daerah perdesaan.
3. Memberi **prioritas lebih** bagi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah Gunung Kidul dan Kulon Progo yang dapat diawali dengan memperlancar akses transportasi dan komunikasi daerah tersebut dengan pusat pertumbuhan.

Tabel L.1.
Angka Kemiskinan Multidimensi menurut Kabupaten/Kota
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013 dan 2015

Kabupaten/Kota		Estima si Jumlah Rumah Tangga Miskin	Estima si Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan Multi- dimensi (H)	Intensita s Kemiskinan Multidimensi (A)	MPI
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2013						
3401	Kab. Kulon Progo	31.105	114.245	28,76	42,06	12,10
3402	Kab. Bantul	60.505	218.831	23,04	42,63	9,82
3403	Kab. Gunung Kidul	84.534	288.214	41,84	41,80	17,49
3404	Kab. Sleman	41.672	141.697	12,44	39,87	4,96
3471	Kota Yogyakarta	4.259	11.368	2,81	36,76	1,03
DIY		222.075	774.355	21,64	41,65	9,01
Tahun 2015						
3401	Kab. Kulon Progo	31.237	106.279	25,79	45,68	11,78
3402	Kab. Bantul	55.936	205.362	20,93	43,80	9,17
3403	Kab. Gunung Kidul	86.722	306.481	42,95	46,68	20,05
3404	Kab. Sleman	40.286	147.785	12,60	42,76	5,39
3471	Kota Yogyakarta	16.461	51.647	12,55	39,07	4,90
DIY		230.642	817.554	22,15	44,64	9,89

Sumber: BPS Provinsi DIY

Tabel L.2.
Karakteristik Kemiskinan Multidimensi menurut Daerah Tempat Tinggal
di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013 dan 2015

Karakteristik Kemiskinan Multidimensi	Kota		Desa		Kota + Desa	
	Estimasi Jumlah RT Miskin	Persentase	Estimasi Jumlah RT Miskin	Persentase	Estimasi Jumlah RT Miskin	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tahun 2013						
Lama sekolah	75.654	17,90	111.663	17,27	18.7317	17,52
Partisipasi sekolah anak	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Buta huruf	55.928	13,24	80.778	12,49	13.6706	12,78
Konsumsi kalori	27.953	6,62	4.081	0,63	32.034	3,00
Konsumsi Protein	51.044	12,08	46.169	7,14	97.213	9,09
Sumber Penerangan	597	0,14	2.396	0,37	2.993	0,28
Sanitasi	27.279	6,46	68.995	10,67	96.274	9,00
Air Bersih	28.240	6,68	60.816	9,40	89.056	8,33
Jenis lantai	13.402	3,17	33.542	5,19	46.944	4,39
Bahan Bakar Memasak	61.097	14,46	114.586	17,72	175.683	16,43
Aset	81.341	19,25	123.725	19,13	205.066	19,18
Tahun 2015						
Lama sekolah	72.096	15,64	95.321	15,67	167.417	15,66
Partisipasi sekolah anak	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Buta huruf	42.027	9,12	67.136	11,04	109.163	10,21
Konsumsi kalori	56.373	12,23	28.559	4,69	84.932	7,94
Konsumsi Protein	85.858	18,62	73.735	12,12	159.593	14,92
Sumber Penerangan	140	0,03	1.296	0,21	1.436	0,13
Sanitasi	20.255	4,39	58.346	9,59	78.601	7,35
Air Bersih	35.213	7,64	46.477	7,64	81.690	7,64
Jenis lantai	9.570	2,08	27.685	4,55	37.255	3,48
Bahan Bakar Memasak	51.339	11,14	101.840	16,74	153.179	14,32
Aset	88.143	19,12	107.927	17,74	196.070	18,34

Sumber: BPS Provinsi DIY

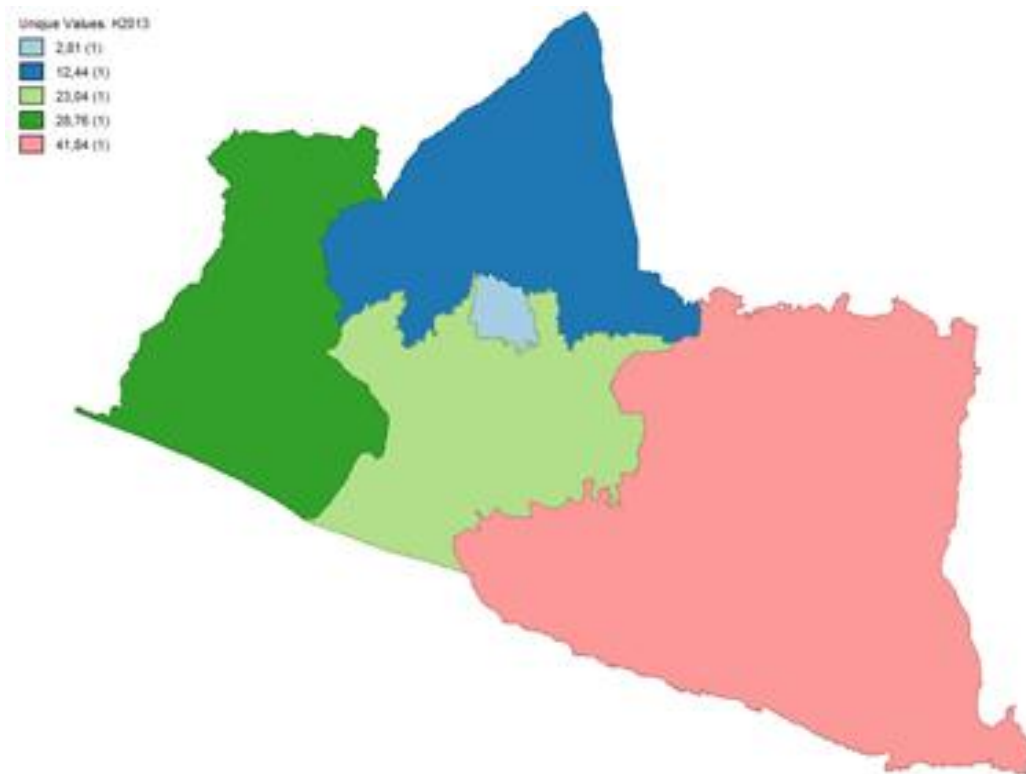
Tabel L.3.
Persentase Rumah Tangga Miskin menurut Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi
di di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013 dan 2015

KABUPATEN/KOTA		Estimasi Jumlah Rumah Tangga Miskin	Pendidikan			Nutrisi dan kesehatan		Standar hidup					
			Lama sekolah	Partisipasi sekolah anak	Buta huruf	Konsumsi kalori	Konsumsi Protein	Akses listrik	Sanitasi	Sumber air minum bersih	Jenis lantai	Bahan bakar memasak	Aset
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tahun 2013													
3401	Kab. Kulon Progo	31.105	41,63	0,00	15,61	2,04	20,20	0,46	25,09	27,69	20,27	65,51	80,37
3402	Kab. Bantul	60.505	33,94	0,00	17,73	8,66	16,50	0,62	9,62	23,49	4,39	25,65	60,27
3403	Kab. Gunung Kidul	84.534	51,21	0,00	29,77	1,69	15,13	0,54	42,76	33,16	13,58	78,30	89,36
3404	Kab. Sleman	41.672	20,64	0,00	11,09	3,18	6,20	0,09	11,83	13,30	1,83	19,46	57,05
3471	Kota Yogyakarta	4.259	10,50	0,00	3,56	2,41	2,45	0,14	7,31	7,27	0,10	1,00	56,34
DIY		222.075	30,46	0,00	15,71	4,01	11,33	0,35	17,89	20,20	6,32	34,37	66,20
Tahun 2015													
3401	Kab. Kulon Progo	31.237	34,59	0,00	12,44	6,99	26,95	0,31	23,51	18,50	13,92	50,62	66,27
3402	Kab. Bantul	55.936	28,75	0,00	9,39	11,12	21,05	0,00	6,47	17,98	5,04	24,55	53,00
3403	Kab. Gunung Kidul	86.722	50,69	0,00	30,50	8,84	29,79	0,45	32,80	29,64	12,07	66,43	78,24
3404	Kab. Sleman	40.286	19,46	0,00	7,59	8,02	12,51	0,15	8,50	19,94	0,85	10,95	46,77
3471	Kota Yogyakarta	16.461	10,37	0,00	3,44	14,30	15,12	0,10	8,00	9,33	0,56	0,88	51,59
DIY		230.642	27,9	0,00	12,24	9,66	19,71	0,18	13,97	19,71	5,32	27,49	56,81

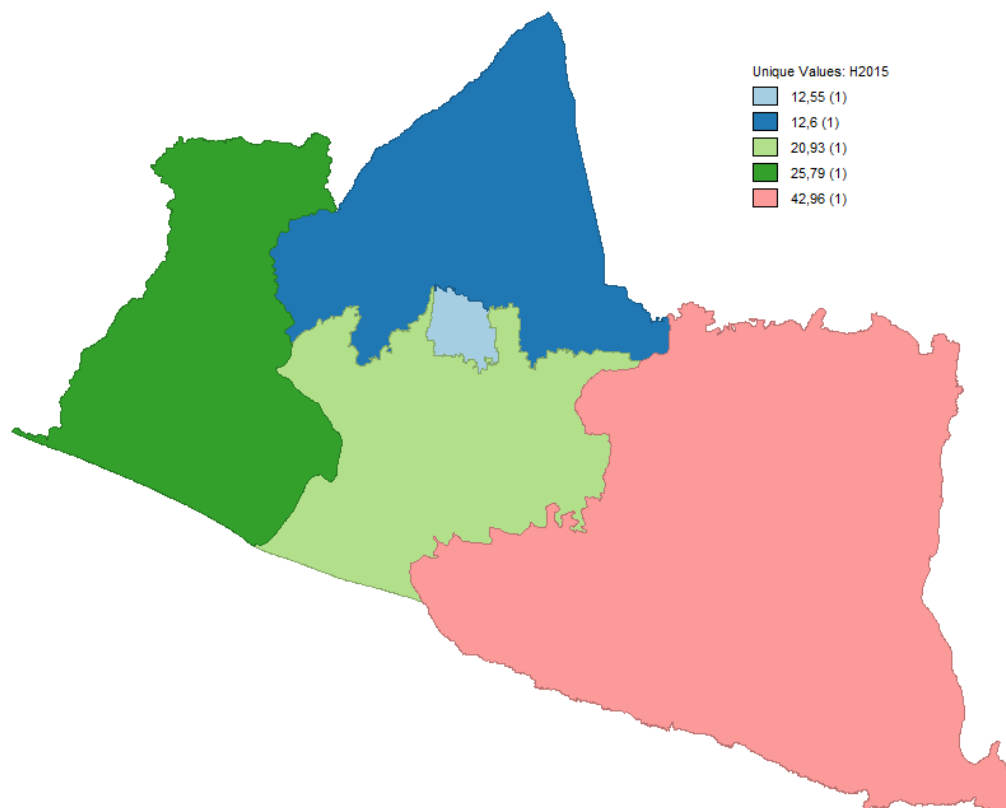
Tabel L.4.
Persentase Penduduk Miskin menurut Dimensi dan Indikator Kemiskinan Multidimensi
di di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2013 dan 2015

KABUPATEN/KOTA		Estimasi Jumlah Penduduk Miskin	Pendidikan			Nutrisi dan kesehatan		Standar hidup					
			Lama sekolah	Partisipasi sekolah anak	Buta huruf	Konsumsi kalori	Konsumsi Protein	Akses listrik	Sanitasi	Sumber air minum bersih	Jenis lantai	Bahan bakar memasak	Aset
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(13)
Tahun 2013													
3401	Kab. Kulon Progo	114.245	41,09	0,00	14,90	2,01	23,28	0,39	25,13	26,91	19,14	65,23	78,77
3402	Kab. Bantul	218.831	34,32	0,00	17,09	10,64	17,64	0,46	8,71	25,22	3,81	21,28	56,66
3403	Kab. Gunung Kidul	288.214	50,21	0,00	29,20	2,37	17,76	0,16	42,55	32,29	12,82	77,18	88,06
3404	Kab. Sleman	141.697	23,81	0,00	12,87	3,55	7,14	0,06	12,84	14,80	1,68	22,12	47,73
3471	Kota Yogyakarta	11.368	10,48	0,00	3,10	2,12	2,34	0,16	8,39	8,08	0,07	0,71	44,77
DIY		774.355	32,09	0,00	16,25	4,87	13,22	0,23	18,32	21,52	6,15	34,86	60,98
Tahun 2015													
3401	Kab. Kulon Progo	106.279	34,78	0,00	12,49	8,72	29,10	0,20	22,01	18,31	11,96	48,81	60,64
3402	Kab. Bantul	205.362	28,30	0,00	8,98	12,97	23,46	0,00	6,01	17,73	4,74	23,06	47,11
3403	Kab. Gunung Kidul	306.481	50,16	0,00	29,44	9,47	33,53	0,22	33,45	29,66	11,01	65,80	75,56
3404	Kab. Sleman	147.785	21,27	0,00	7,49	8,46	15,66	0,05	8,21	22,43	0,85	9,96	36,74
3471	Kota Yogyakarta	51.647	11,49	0,00	3,60	15,28	17,16	0,07	8,33	10,64	0,50	0,59	34,74
DIY		817.554	29,14	0,00	12,26	10,64	22,85	0,09	14,06	20,80	5,05	27,53	49,45

Gambar L.1. Sebaran Persentase Penduduk Miskin Multidimensi (H) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2013



Gambar L.2. Sebaran Persentase Penduduk Miskin Multidimensi (H) Menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2015



DAFTAR PUSTAKA

- Alkire, S., and J.E. Foster. 2011. *Counting and Multidimensional Poverty Measurement*. Journal of Public Economics. 95(7-8): 476-487.
- BPS. 2010. *Penghitungan dan Indikator Kemiskinan Makro 2010 (Profil dan Penghitungan Kemiskinan Tahun 2010)*. Jakarta.
- Bourguignon, Francois and Satya R. Cakravarty. 2003. *The Measurement of Multidimensional Poverty*. Journal of Economic Inequality. April 2003. pg 25. Netherland
- Budiono S., 1991. *Bunga Rampai Hiperkes dan Keselamatan Kerja*. Semarang: PT. Tri Tunggal Tata Fajar.
- Cerra FB. *Manual of Surgical Nutrition*, 4th ed. St. Louis: Mosby-Year Book. 1984:6. <http://www.lyrawati.files.wordpress.com/2008/07/penilaian-status-nutrisi.pdf>
- Dewan Bimas Ketahanan Pangan (DBKP). 2001. *Kebijakan Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional*. DBKP, Jakarta.
- Eka Herdiana, 2009. *Analisis jalur faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga di Lebak Provinsi Banten*. Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogor
- Foster, James. Greer, Joel and Thorbecke, Erik. 1984, "A Class of Decomposable Poverty Measures," *Econometrica*, Vol. 5, No. 3: 761-766
- Hoddinott J. 1999. *Choosing outcome indicators of household food security*. International Food Policy Research Institute. Washington D.C.
- Ikhsan, M. 1999. *The Disaggregation of Indonesian Poverty : Policy and Analysis*. Ph.D. Dissertation. University of Illinois, Urbana
- Jhingan, M.L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartika TWW. 2005. *Analisis coping strategy dan ketahanan pangan rumah tangga petani di desa Majasih kecamatan Sliyeg kabupaten Indramayu*. [skripsi]. Departemen Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Khomsan A. 2002a. Kecukupan Pangan Sebagai HAM. Di dalam: *Fenomena Kemiskinan dalam Pangan dan Gizi dalam Dimensi Kesejahteraan*. Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- _____. 2002b. Pangan sebagai Indikator Kemiskinan. Di dalam: *Fenomena Kemiskinan dalam Pangan dan Gizi dalam Dimensi Kesejahteraan*. Gizi Masyarakat dan Sumberdaya Keluarga, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Manesa J. 2009. *Ketahanan pangan rumah tangga di desa penghasil damar kabupaten Lampung Barat*. [tesis]. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Maxwell, D and T.R. Frankenberger. 1992. *Household Food Security in Greater Accra*, Ghana.
- Mohanty SK. 2011. *Multidimensional Poverty and Child Survival in India*. PLoS ONE 6(10): e26857. doi:10.1371/journal.pone.0026857
- Nanga Muana, 2006, *Dampak Transfer Fiskal terhadap Kemiskinan di Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan*, Disertasi Sekolah Pasca Sarjana IPB, Bogor
- Pakpahan, A. H.P.Saliem, S.H. Suhartini dan N. Syafa'at. 1993. *Penelitian tentang Ketahanan Pangan Masyarakat Berpendapatan Rendah*. Monograph Series No. 14. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.

- Ravallion Martin and Shaohua Chen. 2008. *The Developing World Is Poorer Than We Thought, But No Less Successful in the Fight against Poverty*. The World Bank Development Research Group August 2008 Research Paper No. 2004/4
- Sahn, David E. and David C. Stifel. 2004. *Urban-Rural Inequality in Living Standards in Africa*. UNU World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) Katajanokanlaituri 6 B, 00160 Helsinki, Finland. January 2004
- Soetrisno L. 2002. *Paradigma Baru Pembangunan Pertanian Sebuah Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suandi. 2007. *Hubungan modal sosial dengan ketahanan pangan rumah tangga di daerah pedesaan provinsi Jambi berdasarkan agroekologi wilayah*. Di dalam: Widyakarya Nasional Pangan Dan Gizi 2008.
- Suryana. 2003. *Kapita Selekta Evolusi Pemikiran Kebijakan Ketahanan Pangan*. BPFE, Yogyakarta.
- Sen Amartya. 2000. *Development as Freedom*, Oxford University Press. New Delhi.
- Sen, Amartya. 1987. *The Standard of Living*. The Tanner Lectures On Human Values. Delivered at Clare Hall, Cambridge University
- Sen Amartya. 1981. *Poverty and famines: an essay on entitlement and deprivation*. Clarendon Press. Oxford.
- Tanziha I. 2005. *Analisis Peubah Konsumsi Pangan dan Sosial Ekonomi Rumah tangga untuk Menentukan Determinan dan Indikator Kelaparan*. [disertasi]. Bogor: Program Doktor, Institut Pertanian Bogor
- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa : Drs. Haris Munandar, M. A., Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- UNDP. 1997. *Human Development Report 1997*. Published for the United Nations Development Programme. (UNDP). New York. Oxford. Oxford University Press.
- UNDP (United Nations Development Programme). 2010. *Human Development Report 2010*. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. UNDP, New York.
- World Bank. 2002. *World Development Report 2002 (Overview): Building Institutions for Markets*. <http://dx.doi.org/10.1596/0-8213-5016-1>